

Prof. Dr. Fachruddin, M.A

*Jam'iyah Mahmudiyah
Li Thalabil Khairiyah*

KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI NUSANTARA



Prof.Dr. Fachruddin,M.A

Penulis:

Prof.Dr. Fachruddin,M.A

Karya Pengantar:

Copyright ©2017

JAM'YAH MAHMUDIYAH LI THALABIL KHAIRIAH KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI NUSANTARA



Diterbitkan Oleh:
CV. MANHAJI
Medan
2017

**JAM'ITYAH MAHMUDIYAH LI THALABIL KHAIRIAH
KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI NUSANTARA**

Penulis:

Prof.Dr. Fachruddin,M.A

Kata Pengantar:

Copyright @2017,

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Lay Out:

Johan Iskandar, S.Si

Perancang sampul:

Muhammad Hakiki, S.Kom

Diterbitkan oleh:

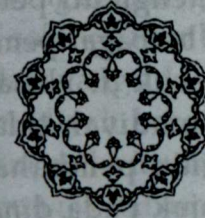
CV. Manhaji Medan

Jl. IAIN/Sutomo Ujung No. 8 Medan

E-mail: cvmanhaji@yahoo.com

ISBN: 978-602-6918-48-2

Cetakan Pertama: April 2017



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Alhamdulillah wa syukru lilllah selawat dan salam buat junjungan nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. Berkat rahmat inayah dan hidayah Allah SWT akhirnya buku berjudul Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah : Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Nusantara ini dapat juga terselesaikan. Judul ini dipilih karena memang difokuskan untuk menekuni kajian Jam'iyah Mahmudiyah dari aspek pendidikan. Sebagai organisasi Sosial Pendidikan yang insyaAllah bulan Desember 2017 ini genap berusia 105 tahun sangatlah layak untuk diungkapkan berbagai kebijakan pembaharuan pendidikan yang telah ditorehkan organisasi ini, Dalam peringatan seratus tahun Jamiyah Mahmudiyah saya bersama team telah berusaha menulis tiga buku terkait keberadaan jam'iyah Mahmudiyah yang pertama tentang Sejarah Jamiyah Mahmudiyah, kedua Pengabdian Alumni Sepanjang Masa dan yang ketiga "Sejarah Ulama Langkat dan Tokoh Pendidik" Ketiga buku tersebut tidak mengungkapkan secara spesifik tentang peranan Jamiyah Mahmudiah dalam pembaharuan pendidikan Nusantara.

Keinginan untuk menggali keterangan yang cukup tentang peran ini sudah lama terbersit dalam pikiran penulis,

bukan saja karena pernah dididik di Tanjung Pura Langkat pada saat sekolah menengah atas, tetapi juga karena bangga pada lembaga pendidikan yang meski usianya telah sangat tua tetapi telah memiliki gedung yang megah dan menghasilkan banyak ulama.

Ketika penulis mengikuti pendidikan doktor telah dilakukan pengkajian berbagai pembaharuan pendidikan dunia Islam dan termasuk di Nusantara. Namun kajian tentang Jam'iyah Mahmudiyah tidak banyak terungkap. Sudah jamak tiap kajian pembaharuan pendidikan di Nusantara selalu merujuk pada dinamika perkembangan pendidikan di Sumatera Barat yang berlangsung ada awal abad ke XX. Keterangan tentang Jam'iyah Mahmudiyah ada sedikit disinggung Mahmud Yunus dalam bukunya sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Hal itu disebabkan tidak adanya keterangan sejarah dan buku yang diterbitkan mengenai Jam'iyah Mahmudiyah. Ketika tahun 2012 saya diangkat sebagai Ketua Pengurus Besar Jamiyah Mahmudiyah dan di percayakan sebagai wakil ketua panitia peringatan milad 100 tahun saya mendapati dari hasil penelitian yang saya laku bersama team diperoleh keterangan yang menjelaskan keberadaan Madrasah Maslurah dan pendidikan pengajian agama di Istana, serta penyelenggaraan pendidikan Agama di Mesjid -mesjid serta perhatian yang luar biasa dari Sulthan Langkat dan para ulama untuk mendedikasikan diri mengembang suburkan pendidikan Agama Islam di wilayah ini, serta gagasan gagasan penting yang dilakukan yang belum ada didaerah lain di Nusantara ini. Seperti adanya pendidikan Agama untuk perempuan yang kemudian diinstitusikan dalam bentuk pendidikan formal Madrasah lil Banat yang ketika itu istilah madrasah saja belum digunakan di Nusantara ini, demikian pula untuk penyelenggaraan pendidikan perempuan. Demikian juga gagasan untuk mendirikan lembaga khusus mengurus pendidikan dan pengajaran sekaligus sebagai pemegang wakaf dan bertanggungjawab atas keberlangsungan pendidikan Islam pada tahun 1912 adalah gagasan yang mencengangkan

penulis, sebab ketika itu dinusantara belum ada organisasi khusus yang bergerak untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan. Memang sebulan lebih awal di Yogyakarta telah berdiri organisasi keagamaan bernama parsyarikatan Muhammadiyah. Tetapi sekali lagi membuat penulis tercenung apakah gagasan di Yogyakarta itu mempunyai pengaruh sehingga timbul gagasan di Sumatera Timur. Ternyata dari data yang ada justru latar belakangnya berbeda jika Muhammadiyah berdiri untuk melaksanakan peemurnian ajaran Islam maka justru Jam'iyah Mahmudiyah berdiri untuk bertanggung jawab untuk pembinaan generasi muda Ummat Islam dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Selain itu yang unik lagi organisasi ini sekaligus berfungsi sebagai pengelola wakaf dan asset lembaga pendidikan yang ada dan dibangun oleh kesulthanan, disaat itu belum lazim ada organisasi wakaf seperti itu. Selanjutnya ketika penulis mengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam pada program S2 dan S3 Uniniversitas Islam Negeri Sumatera Utara banyak kandidat doktor ilmu pendidikan yang mengangkat Jam'iyah Mahmudiyah sebagai bahan kajian. Hal hal itu makin memperkuat penulis untuk memulai menulis buku ini walaupun kajiannya masih belum cukup mendalam, penulis berniat akan terus melakukan studi lebih lengkap dengan mengungkap berbagai kebijakan pembaharuan pendidikan ini dalam kontek sejarah sosial. Ada banyak data yang belum diperoleh misalnya data tentang hubungan kerjasama dengan Arab Saudi serta dokumen penting pemerintah kolonial tetang Jam'iyah Mahmudiyah serta pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Nusantara serta data lainnya. Motivasi menulis buku ini juga tumbuh menjadi lebih kuat karena penulis mendapati banyak generasi baru Jam'iyah Mahmudiyah dan para alumni, guru dan bahkan dosen serta pimpinan yang diberi amanah memimpin Jam'iyah Mahmudiyah tidak mengetahui kebesaran organisasi ini. Justru itu untuk menumbuhkan *sense of belongingness* dan *sense of responsibility* penulis berpandangan sesederhana apapun

buku ini semestinyalah diterbitkan segera. Disamping itu suatu hal yang tidak dapat dipungkiri sudah pada tempat dan waktunya Jamiyah Mahmudiyah pada usia memasuki millinium kedua melakukan pembinaan organisasi dengan mewajibkan semua personal yang tergabung sebagai keluarga besar Jamiyah Mahmudiyah baik sebagai pelajar, mahasiswa, alumni, pengurus apalagi pimpinan untuk mengetahui dengan baik sejarah, kebesaran dan pengaruh jam'iyah mahmudiyah masa lalu dan bertanggung jawab untuk dapat untuk menumbuhkan kembangkan dengan modal sejarah dan keberhasilan organisasi sosial pendidikan ini menjadi lembaga yang mampu mengelola pendidikan Islam yang berkualitas ke depan.

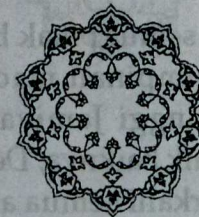
Penulis berharap dengan terbitnya buku ini civitas akademika dan keluarga besar Jamiyah Mahmudiyah dapat terpacu menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan Jamiyah Mahmudiyah selanjutnya buku ini dapat pula menjadi referensi bagi program pendidikan yang dirancang Pengurus Besar Jam'iyah Mahmudiyah untuk mulai dari tahun ajaran 2017/2018 semua lembaga pendidikan Jamiyah Mahmudiyah mulai dari tingkat dasar sampai ke Pendidikan Tinggi diberikan mata pelajaran / mata kuliah ke -Jam'iyah Mahmudiyah-an.

Kepada semua pihak yang turut memberi kan masukan dan memberikan dorongan terbitnya buku ini penulis mengucapkan terima kasih.

Melborne, Desember 2016

Penulis

Prof..Dr.H.Fachruddin Azmi,MA



KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wasshalatu wa salamu ala rasulillah, qalallahu fi kitabil Azhim, Laqad Kana fi Qashashim al Ibrah, Amma Ba'du

Pertama tama kami selaku Badan Pembina mengucapkan terima kasih kepada Prof Dr.Fachruddin Azmi,MA sebagai guru besar UIN SU dan Ketua Umum PB Jam'iyah Mahmudiyah yang telah dapat meluangkan waktu menulis buku : Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah : Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Nusantara".

Sebagai organisasi Pendidikan yang tertua di Sumatera dan di tanah air tentulah penulisan sejarah dan berbagai peranan yang telah disumbangkan untuk kemajuan pendidikan agama Islam sangat diperlukan. Baik untuk kepentingan kajian akademis - ilmiah maupun bagi pengembangan Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil Khairiyah kedepan.

Menurut hemat kami buku ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi bagi keluarga besar Jamiyah Mahmudiyah dan masyarakat Islam guna membangun wawasan untuk memajukan Jamiyah Mahmudiyah Khususnya dan pendidikan Islam di Indonesia umumnya. Berbagai pembaharuan yang sudah dilakukan melalui

kebijakan Sulthan maupun ulama yang dikemukakan dalam buku ini dapat menjadi bahan inspirasi bahwa pembaharuan itu harus terus berlanjut tiada hentinya, seiring pada era globalisasi ini pembaharuan tersebut tentu menjadi acuan untuk melahirkan gagasan pembaharuan yang lebih maju lagi kedepan.

Kami menghimbau semua pihak baik pelajar, mahasiswa, alumni, guru, dosen, pimpinan madrasah, pengurus dan pengelola perguruan tinggi Jamiyah Mahmudiah dapat memanfaatkan buku ini sebaik baiknya, Dermikian semoga Allah SWT senantiasa memberkahi semua amal ibadah kita Amin

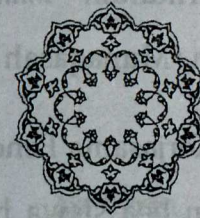
Medan Desember 2016

Ketua Umum Pembina

Yayasan Jamiyah Mahmudiyah

Li thalabil Khairiyah

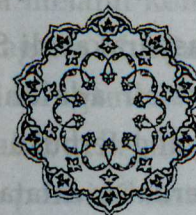
Prof.Dr.H.Abdullah Syah MA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pengembangan dan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Islam	7
A. Mendirikan organisasi Sosial Pendidikan Islam	7
B. Memperluas fungsi Pendidikan Istana Pendidikan Untuk Bangsa wan dan Rakyat	13
C. Otonomi wilayah belajar dan pusat kehidupan masyarakat yang shaleh	16
BAB III Kebijakan Mengembangkan Madrasah	19
A. Pendirian Madrasah dan Madrasah Khusus Puteri	19

B. Pengembangan sistem jejang pendidikan dan Struktur Kurikulum	23
C. Sistem Ujian/Munaqasah	35
BAB IV Membangun Kerjasama Pendidikan	39
A. Memberikan bea siswa belajar ke Azhar Kairo, Ummul Qura Mekah, dan Prancis ..	39
B. Memberikan Bea Siswa Belajar ke Luar Negeri	40
BAB V Pembinaan Sistem Pendanaan Pendidikan	43
A. Kerjasama Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan	43
B. Mengembangkan sistem endowment Financial Pendidikan	57
BAB VI Refleksi Dan Implikasi	65
A. Refleksi	65
B. Implikasi	69
BAB VII Penutup	71
A. Optimalisasi Organisasi Pendidikan Islam Jamiyah Mahmudiyah Membangun Sumber daya Manusia	71
B. Memberdayakan Keunggulan Madrasah ke Masa Depan	87
C. Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah Dan Semangat Kebangsaan	102
DAFTAR PUSTAKA	115



BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan Islam secara historis sudah tumbuh dan berkembang sejak mulai abad ke VII. bersamaan dengan penyiaran agama Islam di Nusantara Sesuai dengan kondisi masyarakat Nusantara pada abad ke VII tersebut pada umumnya belum memiliki tradisi tulis baca. Tradisi tulis baca hanya ada dikalangan segelintir orang seperti kaum bangsawan atau raja-raja serta para begawan, empu atau resi, para punggawa dan pedagang sedangkan masyarakat sangat jarang yang menguasai kemampuan tulis baca tersebut. Kedatangan Islam melalui para penyiar Islam telah merubah keadaan itu, menulis dan membaca berangsur angsur telah menjadi budaya masyarakat terutama yang menganut agama Islam. Masyarakat Islam terpacu untuk menguasai tulis baca karena ini merupakan konsekwensi logis dari ajaran Islam yang mewajibkan untuk tulis baca. Masyarakat yang sebelumnya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca dengan tulisan huruf palawa berangsur-angsur mulai menggunakan aksara Arab dalam menulis. Peralihan

penulisan ke aksara Arab ini erat hubungannya dengan makin banyaknya ulama yang menulis kitab dan memberikan penjelasan tentang agama Islam dengan bahasa Melayu dan makin maraknya pengkajian Islam terutama dikalangan masyarakat pesisir dan masyarakat pedagang.

Demikian juga masyarakat di Sumatera Timur yang sebagai masyarakat pesisir adalah masyarakat terbuka berada di zona pesisir yang terbuka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Berdasar catatan sejarah kawasan ini mempunyai hubungan erat dengan kerajaan Islam Perlak, dan juga Samudra Pasei hubungan itu terus berlangsung pada masa berikut dengan kerajaan Aceh. Diperkirakan mulai abad VII masyarakat wilayah ini telah beragama Islam terutama raja-raja, kalangan bangsawan yang secara langsung adalah merupakan perwakilan pemerintahan kerajaan Aceh, serta para pengetua adat dan para pedagang yang ada di wilayah ini. Pada abad ke XII telah berdiri kerajaan Aru yang wilayahnya mulai dari Tamiang sampai ke Sungai Rokan di daerah Siak Riau Kerajaan ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok beberapa delegasi dikirim dimulai tahun 1282. (Lukman Sinar, 1993,12)

Peran penguasa (Umara) dan ulama yang sangat dekat dengan para pengetua adat (Zuama'), serta pedagang (Aghniya') menjadi suatu faktor kunci terbina masyarakat Muslim di kawasan ini. Kerajaan Langkat termasuk bahagian kerajaan Aru sejak awal kerajaan Langkat berdiri raja-raja Langkat sangat dekat dengan ulama. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah berupa makam seorang Imam yang bernama Sidiq bin Abdullah nisan pada makamnya bertuliskan wafat pada hari rabu tanggal 23 Sya'ban 798 H atau 27 Juni 1590. Beliau adalah ulama

yang menjadi Imam kerajaan Langkat masa awal. (Fuad Said,1983,51-57)

Pendidikan Islam pada masa awal ini berlangsung dalam tiga bentuk, pertama di rumah para ulama kedua di Istana raja, dan ketiga melalui kontak person, komunikasi sehari-hari antara pedagang Muslim dengan pelanggannya. Bentuk yang ketiga ini mengambil tempat dimana saja seperti di tempat tempat istirahat di Pelabuhan, ataupun pekan atau pasar atau di daerah pesisir Sumatera Timur disebut juga pajak. Sebagaimana dijelaskan Mahmud Yunus bahwa para penganjur Islam ketika itu mempergunakan kesempatan dimana saja mereka berada, apatah dipinggir kali ketika menanti perahu, diperjamuan waktu kenduri, dipadang rumput tempat gembala ternak, tempat penimbunan barang dagangan, dipasar disela-sela jual beli (Mahmud Yunus,1979.12) Sejak berdirinya tempat-tempat pemukiman para pedagang yang datang dari gujarat dan pedagang muslim lainnya maka merekapun mulai mendirikan mushalla. Atau Mesjid. Di tempat inilah mereka memberikan penerangan agama terutama pada waktu sesudah melaksanakan shalat dan pada waktu luang sambil istirahat. Mushalla ini kemudian berkembang menjadi Mesjid yang menjadi sarana utama penyelenggaraan pendidikan Islam untuk semua kalangan. Mesjid dalam sejarah pendidikan Islam disebut sebagai universitas terbuka (Athiyah Abrasyi,1975, 34)

Penyelenggaraan pendidikan Islam pada masa itu di kepulauan Nusantara dan negeri Islam lainnya hampir sama yaitu bersifat ceramah dan lisan, beberapa diantaranya ada yang menggunakan kitab. Terutama pengajian di Istana dan dirumah Ulama menggunakan kitab serta telah menggunakan alat tulis. Pada masa berikutnya sekitar abad

ke XVII berdasar catatan sejarah telah ada yang mengajarkan pelajaran tulis baca bagi anak-anak muslim. Pengajaran yang berlangsung ditempat-tempat tersebut dengan sistem khalafah. Beberapa pembaharuan dalam bidang metodologis telah berlangsung dalam kurun waktu tersebut. Seperti adanya kebiasaan untuk mendatangi guru untuk mengecek bacaan dan pemahamannya tentang buku/kita yang telah dipelajarinya. Penjenjangan tidak berdasarkan usia atau kelas tetapi berpatokan pada kitab yang dipelajari dan baru berpindah pada pengajaran yang lebih tinggi dan luas pada kitab lainnya yang ditunjuk oleh guru atau ustaz.

Kondisi pengajaran pendidikan Islam seperti hal itu terus berlangsung sebagai mana hal dikemukakan tersebut sampai awal abad ke XVIII. Pada saat berlangsungnya upaya pembaharuan pemikiran di dunia Islam yang dipelopori Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh di Mesir. Pengaruhnya ternyata sampai juga ke Nusantara. Beberapa ulama melancarkan pula pembaharuan baik bentuk pengajaran maupun metode pengajaran agama.

Di Sumatera Timur atau kerajaan Langkat tampaknya pembaharuan itu diawali dengan adanya dukungan kebijakan sulthan Langkat Keshalehan dan kepedulian sulthan pada pendidikan Islam dan kedekatannya kepada ulama serta kepedulian para zuama' dan aghniya' turut menjadi faktor pendukung berkembangnya pendidikan Islam di daerah ini.

Kajian ini mencoba menelusuri berbagai kebijakan yang dilakukan sulthan Langkat dan para ulama pada masanya dalam bentuk pembaharuan pendidikan yang pernah digagas dan dikembangkan di Sumatera Timur yang meliputi upaya pembaharuan dalam hal:

- A. Pengembangan dan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Islam
- B. Memperluas fungsi Pendidikan Istana; Pendidikan Untuk Bangsawan dan rakyat
- C. Memberikan hak otonomi wilayah pusat belajar dan pusat kehidupan masyarakat yang shaleh.
- D. Mengembangkan Model Pendidikan Madrasah
- E. Mengembangkan sistem jejang pendidikan dan Struktur Kurikulum
- F. Sistem Ujian
- G. Memberikan bea siswa belajar ke Azhar Kairo, Ummul Qura Mekah, dan Prancis
- H. Kerjasama ketenagaan
- I. Dana Wakaf
- K. Asrama

Kesemua kebijakan Pembaharuan pendidikan di Sumatera Timur ini jika di dibandingkan dengan daerah lain maka dapat dinyatakan sebagai kebijakan pembaharuan pendidikan yang pertama di Nusantara.

Berbagai kebijakan pembaharuan pendidikan Islam tersebut dalam buku ini dirangkum dalam enam bab. Bab pertama Pendahuluan yang mengemukakan latar penulisan buku ini. Selanjutnya pada Bab Kedua dikemukakan kebijakan tentang Pengembangan dan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Islam. Kebijakan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Mendirikan organisasi Sosial Pendidikan Islam
- b. Memperluas fungsi Pendidikan Istana; Pendidikan Untuk Bangsawan dan Rakyat

- c. Memberikan hak otonomi wilayah Pusat belajar dan pusat kehidupan masyarakat yang shaleh.

Pada bab III diuraikan kebijakan Mengembangkan Model Pendidikan Madrasah kebijakan ini meliputi a. pengembangan Madrasah dan Madrasah Khusus Puteri b. Mengembangkan sistem jenjang pendidikan dan Struktur Kurikulum c. Sistem Ujian d. Madrasah berasrama

BAB IV Membangun Kerjasama Pendidikan

- A. Memberikan beasiswa belajar ke Azhar Kairo, Ummul Qura Mekah, dan Prancis

- B. Kerjasama ketenagaan

BAB V Pembinaan Sistem Pendanaan Pendidikan

- A. Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf Sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan

- B. Mengembangkan sistem endowment financial Pendidikan

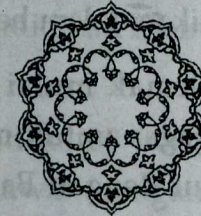
BAB VI Refleksi dan Implikasi

BAB VII Penutup

- A. Optimalisasi Organisasi Pendidikan Islam Jamiyah Mahmudiyah Membangun Sumber daya Manusia

- B. Membangun Keunggulan Madrasah

- C. Jamiyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah Dan Semangat Kebangsaan



BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Mendirikan Organisasi Sosial Pendidikan Islam

Bila ditelusuri berbagai catatan tentang perkembangan pendidikan Islam di kepulauan Nusantara maka ditemukan bahwa upaya pengembangan dan penguatan penyelenggaraan Pendidikan Islam telah mulai sejak masa awal masuknya Islam ke Nusantara di pesisir pantai Sumatera pada abad pertama Hijrah abad VII. Pada abad II Hijriah abad VIII M telah terdapat pemukiman masyarakat Islam yang permanen (N.A. Baloch, 1980) ditandai dengan berdirinya Kerajaan Perlak dan Samudera Pasei di Aceh Sampai abad XI M Islam sudah menyebar dan menjadi agama yang dianut sebahagian besar masyarakat nusantara terutama dibahagian pantai dan kemudian menyebarkan ke pedalaman. Pada priode selanjutnya di pulau Jawa berdiri kerajaan Demak.

Pada masa awal di Aceh tidak ditemukan catatan adanya organisasi pendidikan tetapi diterangkan adanya berbagai

kegiatan yang teratur dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama di Mesjid yang dihadiri juga oleh beberapa ulama dari Timur Tengah. Keterangan itu mengasumsikan bahwa telah berlangsung satu upaya pengorganisasian pendidikan yang intensif meskipun tidak membentuk atau dikelola oleh suatu organisasi pendidikan dalam bentuk kelembagaan

Ketika kerajaan Demak mulai bertumbuh Sulthan bersama ulama menggagas untuk mendirikan organisasi Pendidikan yang disebut dengan Bayangkari Ishlah yang diprakarsai oleh Raden Fatah (Falatehan). Gagasan ini sangat mencengangkan mengingat pada masa itu belum ada bentuk organisasi pendidikan yang muncul apalagi ketika itu pengaruh ulama sangat menonjol dan kharismatik dan masih kuatnya pandangan bahwa ulama adalah perantara antara manusia dan Tuhan. Mungkin ulama ingin menyatakan bahwa Islam memposisikan guru sebagai orang menjelaskan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya dan hubungan seseorang dengan Allah sang pencipta adalah hubungan langsung, makin tinggi dan luas ilmu dan amal seseorang maka makin dekat dengan dan terbuka hubungan dengan Tuhannya. Berbeda dengan pandangan agama diluar Islam. Maka untuk itulah Raden Fatah dan ulama lainnya (wali songo) mendirikan organisasi bayangkari Ishlah ini. Salah satu misi organisasi ini adalah menghilangkan sinkritisme, perbuatan syirik dan khurafat. Perkumpulan ini kemudian mendirikan Pesanteren Gelagah Arum pada tahun 1476. Fakta ini menolak asumsi Sten Brink yang justru menyatakan bahwa polarisasi interen dikalangan umat Islam, konflik dan perbedaan pendapat, sudah terjadi pada abad ke-15, tetapi pada priode itu tidak muncul organisasi seperti abad ke-20. Fakta sejarah menunjukkan telah berdiri pada abad ke-15

Bayangkari Ishlah sebagai wadah pengelola pendidikan dan pengajaran dimasanya. Memang berdirinya Bayangkari Ishlah bukan karena faktor polarisasi intern atau konnflik dikalangan umat Islam tetapi lebih dikarenakan untuk kemashalahatan ummat. Lama berselang sesudah itu belum muncul organisasi pendidikan Islam lainnya sampai ke awal abad ke -20.

Pada awal abad ke-20 berlangsung pembaharuan pendidikan Islam. Diawali dengan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afgani, Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Pemikiran mereka menginspirasi para ulama di tanah air terutama mereka yang pernah belajar di Timur Tengah. Pembaharuan tersebut berlangsung dalam 3 aspek yaitu dimulai dengan perbaikan sistem belajar, dan bahan ajar termasuk kitab kitab yang dipakai serta belajar halaqah menjadi berkelas. Pada tahun 1909 Syekh Abdullah Ahmad Mendirikan Madrasah Adabiyah dengan nama Adabiyah School, kemudian tahun 1910 HM Thaib Umar mengikut langkah itu dengan mendirikan Madrasah dengan nama Madras School (Mahmud Yunus 1973, 63) dan disusul oleh ulama lainnya. Pada lembaga pendidikan itu dilakukan pembaharuan dalam aspek perbaikan sistem pelajaran yang semula tidak menentukan peserta didik dari segi usia pada lembaga pendidikan itu, mulai menentukan usia peserta didik yang mengikuti ajenjang pendidikan yang dilakukan, bahan ajar ditetapkan memasukkan pengetahuan umum dan bahasa Belanda yang sebelum tidak diberikan di lembaga pendidikan Islam yang ada dan selanjutnya menerapkan sistem kelas.

Suatu hal yang menarik di Langkat Tanjung Pura justru Sulthan Langkat Memiliki visi bahwa lembaga pendidikan yang ada seperti majelis ta'lim di Mesjid dan Madrasah Lil

Banat atau Madrasah Maslurah serta Madrasah Diniyah termasuk pengajian yang berlangsung di Istana yang selama ini sudah berkembang perlu mendapat pembinaan yang serius seperti halnya peraditan agama dibawah mufti. Maka pendidikan agama menurut beliau dan pemikiran ulama saat itu perlu dibina secara sungguh-sungguh. Atas dasar itu ulama beserta Sulthan mendirikan organisasi pendidikan dengan nama Jama'iyah Mahmudiyah pada 31 Desember tahun 1912 bertepatan dengan 22 Muharram 1331 H kemudian setelah itu atas usul dan pendapat para ulama beliau mewakafkan istana lama untuk penyelenggaraan Madrasah Maslurah dan kemudian mensponsori berdirinya madrasah Mahmudiyah dan selanjutnya madrasah Aziziyah.

Kebijakan ini dapat dinyatakan sebagai awal gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Sumatera Timur. Jika ditelusuri latar belakang kebijakan ini maka terdapat beberapa faktor pendorong. Antara lain; *pertama* munculnya gagasan ini karena adanya wasiat dari Sulthan Musa ayahanda Sultan Abdul Aziz yang terkenal thaat dan memiliki obsesi adanya pendidikan agama untuk masyarakat. *Kedua*, Pendidikan yang dijalankan di Istana semakin banyak siswanya sehingga tidak tertampung dan terindikasi mengganggu kegiatan kesulthanan. *Ketiga*, Wawasan Sulthan Abdul Aziz yang luas dan jauh kedepan yang menginginkan adanya pembaharuan dalam bidang pendidikan agama. Hal ini makin kuat setelah beliau ikut rombongan orang tuanya mengerjakan ibadah haji dan setelah beliau mendirikan sekolah dasar 7 tahun "*Langkatsche School*" dan sekolah dasar 5 tahun, dan 3 tahun di beberapa tempat. *Keempat* adanya dukungan serta saran yang kuat dari ulama yang dekat dengan sulthan. *Kelima* adanya kecenderungan semangat dan pemikiran yang berkembang pada masa itu yaitu semangat untuk memajukan

bangsa yang disuarakan oleh para tokoh muda terpelajar seperti di pelopori oleh Dr. Sutomo yang menginginkan adanya penghargaan dan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan anak bangsa. Beliau memprakarsai berdirinya persyarikatan yang bergerak untuk mencapai tujuan tersebut yang diberi nama "Budi Utomo" Semangat itu sangat kental pada gerakan organisasi Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabal Khairiyah terutama bila dicermati makna dari nama organisasi sosial dan pendidikan ini yaitu: "Perhimpunan yang Terpuji untuk mencapai kebajikan" Jika budi Utomo mendasari perjuangannya melalui adat dan budaya serta kemanusiaan hal yang sama juga menjadi dasar perjuangan Jam'iyah Mahmudiyah hanya yang lebih spesifik pada Jam'iyah Mahmudiyah adalah berbasis pada ajaran Islam.

Selain faktor diatas tampaknya kebijakan atau gagasan mendirikan organisasi pendidikan ini mengandung maksud agar penyelenggaraan pendidikan agama Islam dapat berkembang secara lebih luas diluar otoritas kesulthanan dengan demikian keberlangsungannya tidak tergantung kepada kebijakan sulthan yang mungkin saja berganti dan tidak sama visinya. Dipihak lain menjadikan lembaga pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama sulthan, ulama dan masyarakat. Tampaknya sulthan menginginkan organisasi pendidikan itu berkembang dengan partisipasi penuh masyarakat dan bersifat otonom sebagaimana halnya otonomi yang diberikan kepada Tuan Syech Abdul Wahab Rokan yang mendapat izin untuk mendirikan Babussalam yang disetujui otoritasnya oleh sulthan Musa sulthan sebelumnya. Mengenai Kebijakan memberikan otonomi wilayah ini akan dikemukakan dalam bahagian tersendiri. Hanya bedanya Babussalam otonomi wilayah sedangkan Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil Khairiyah otonomi organisasi. Hal ini terlihat dari aktivitas

Jam'iyah Mahmudiyah dalam membangun gedung dan menghimpun dana dari para dermawan dan masyarakat Islam, sulthan hanya berperan memberikan bantuan untuk mendukung kemampuan masyarakat tersebut. Demikian pula dalam hal membuat keputusan diserahkan sepenuhnya yang dilangsungkan melalui musyawarah. Meskipun pada hal hal atau gagasan utamanya datang dari Sulthan ataupun demikian juga jika usulan dari para pimpinan Jam'iyah Mahmudiyah.

Hal ini dapat dicermati dari proses pengelolaan pendidikan yang diserahkan kepada Syech H. Muhammad Nur dan Syech Muhammad Yusuf dengan panggilan Tok Ongku seorang ulama terkemuka yang lama belajar di Mekah Pendidikan yang berlangsung di Istana yang semula sejak Sulthan Musa dan Sulthan sebelumnya diperuntukkan untuk anak dan keluarga istana. Dibawah asuhan Tuan Syekh H. Muhammad Nur atas persetujuan Sulthan Abdul Aziz diperbolehkan diikuti oleh masyarakat yang berkeinginan. Meskipun sebenarnya untuk pendidikan masyarakat ini sudah pula diselenggarakan di Mesjid yang dibangun oleh Sulthan seperti Mesjid di Pangkalan Berandan, Tanjung Pura, Stabat dan Binjai dan daerah Selesai. Khusus Tanjung Pura dibangun pula Mesjid Raya yang megah yang mulai dibangun pada tahun 1900 dan pada 13 Juni 1902 Sultan meresmikan berdirinya Mesjid Azizi.

Karena pengajaran agama di Mesjid itu telah penuh disebabkan sangat banyak masyarakat yang berminat maka Sulthan mengambil kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini meski diselenggarakan di Istana masyarakat dapat mengikuti pendidikan tersebut. Ketika jumlah pelajar semakin banyak

dalam suatu musyawarah bersama tuan Syech H.M Nur, H.M. Ziadah dan beberapa ulama serta pembesar istana, sulthan menyampaikan gagasan untuk mendirikan organisasi pendidikan yang diberi nama Al-Jama'iyah Mahmudiyah Lithalabil khairiyah. Gagasan ini diterima dan disambut baik oleh majlis musyawarah.

Jika dicermati gagasan ini sangat modern pada jamannya setelah Bayangkari Ishlah yang disebut terdahulu tercatat baru ada beberapa saja organisasi pendidikan dan sosial kemasyarakatan Islam di Nusantara ini seperti Jamiat Al-Khair yang didirikan di Jakarta tahun 1902 dan Muhammadiyah yang didirikan bulan November 1912 di Yogyakarta. Tercatat pula pada tahun ini juga berdiri Sarikat Islam.

Untuk menjalankan kiprah organisasi pendidikan ini Sulthan menyediakan anggaran belanja yang diambil dari anggaran kesulthanan, dan mewakafkan areal seluas 4,3 ha, serta beberapa hasil sewa toko, dan perkebunan

B. Memperluas Fungsi Pendidikan Istana ; Pendidikan Untuk Bangsawan Dan Rakyat

Pendidikan di Istana dalam dunia Islam hadir setelah sistem khilafah berganti menjadi sistem kerajaan atau dinasti. Sebelumnya pendidikan dalam dunia Islam dilangsungkan pada institusi pendidikan yang didirikan masyarakat dibawah otoritas para ulama. Institusi itu terdiri dari Daar, Kutab/Maktab, Mesjid, Masjid Khan, Majlis Ilmu, Maktabah, Madrasah dan Jami'ah atau univetsitas. Selain itu pada institusi tersebut pengajaran juga berlangsung di Salon Kesusasteraan, perpustakaan, observatorium, bimaristan (rumah sakit) dan juga di pabrik pabrik. Demikian

semaraknya kegiatan pendidikan dalam masyarakat Islam maka tidaklah mengherankan dua abad kemudian Islam mencapai kemajuan yang pesat dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke VII s/d ke XVI. Disamping instusi pendidikan yang disebut diatas juga terdapat pendidikan di Istana. Pendidikan di Istana telah menjadi tradisi dari sejak imperium Romawi. Tradisi ini tampaknya diikuti pula oleh raja-raja Persia. Ketika Islam muncul menjadi suatu imperium baru dibawah dinasti Umayyah, Abbasiyah, Seljukiyah, Usmaniyah dan dinasti lainnya. Para khalifah Umayyah dan Abbasiyah dan dinasti dinasti itu mengadopsi pula tradisi tersebut. Pendidikan di Istana ini khusus diikuti oleh putera-puteri sulthan dan para keluarga kerajaan. Pendidikan di Istana berlangsung dibawah asuhan para ulama terkemuka dan para failosuf serta pakar keilmuan khusus. Meskipun demikian tidak menyebabkan sulthan dan putera-puteri serta keluarganya tidak boleh mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di luar Istana, bahkan lazimnya mereka memperkuat pendidikan yang diselenggarakan di Mesjid juga tempat lainnya, para sulthan kerajasan Islam biasanya sangat intens mengikuti dan mendukung majlis ilmu.

Ketika Islam meluas pengaruhnya melalui jalur perdagangan ke Asia tengah dan Asia timur serta Asia tenggara penyebaran agama Islam mendapat sambutan dari masyarakat pribumi dan juga para raja-rajanya. Bahkan diantara raja-raja itu ada dari para ulama atau keturunannya yang dikawinkan dengan puteri raja atau dirajakan oleh masyarakat. Dengan proses itu tumbuhlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Perlak kemudian Pasei adalah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Berdasarkan catatan perjalanan sejarawan Muslim

Ibnu Batutah mengungkapkan bahwa di Kerajaan Pasei telah ada pendidikan yang berlangsung di Mesjid yang dipimpin ulama dari Timur Tengah diikuti oleh sulthan dan para pembesar serta masyarakat dan juga para saudagar manca negara. Sesuai dengan tradisi yang ada bukan tidak mungkin ada juga diselenggarakan pendidikan khusus di Istana.

Menurut catatan sejarah kerajaan Langkat sejak awal berdirinya para Sulthan telah menempatkan ulama sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan. Kedudukan ulama selain menjadi guru bagi sulthan sendiri dan putera-puteri serta keluarga kerajaan. Ulama juga sekaligus Qadhi/Hakim dan juga penasehat kerajaan. Ulama yang diamanahkan mejadi imam atau mufti pada kesulthanan Langkat yang pertama adalah Syech Imam Siddiq bin Abdullah berdasarkan tulisan di nisan makamnya beliau wafat pada hari Rabu tanggal 23 bulan Sya'ban tahun 798H/27 Juni 1590.

Diantara ulama yang tercatat menjadi guru sulthan adalah Syekh Abdul Wahab Rokan dan Syekh H.M.Nur kedua ulama ini adalah teman seperguruan ketika di Mekah. Sulthan Musa mengangkat Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai guru dan sekaligus penasehatnya. Kemudian Sulthan Musa memberikan suatu daerah otoritas untuk perkampungan Tarikat yang dipimpin syekh Abdul Wahab Rokan yang dikenal dengan daerah Babussalam (Besilam) sebagaimana akan diuraikan pada bab tersendiri sebagai suatu model pembaharuan pendidikan yang sangat penting dari Sulthan Musa. Sebagaimana halnya Syekh Abdul Wahab Rokan demikian juga Syekh H.M.Nur dipercaya sebagai guru Istana dan sebagai Hakim/Qadhi/ mufti kerajaan. Pada masa kesulthan AbdulAziz Abdul Jalil Rahmatsyah syekh HM.Nur

dipercaya untuk melanjutkan peranannya sebagai mana pada masa Sulthan Musa.

Pada masa pemerintahan Sulthan Abdul Jalil Rahmat Syah ini ada Terobosan yang perlu dicatat yaitu tentang gagasan Sulthan untuk menjadikan sekolah istana dapat juga diakses atau diikuti oleh masyarakat awam yang berkepentingan. Gagasan ini merubah sekolah istana yang elitis menjadi lebih populis.

Gagasan pemikiran ini muncul ketika pendidikan yang diselenggarakan di Mesjid sudah membeludak atau tidak dapat memampung lagi karena terlalu banyak peminat. Selain itu tampaknya memang Sulthan ingin putera/i dan keluarga kerajaan tidak terpisah dengan masyarakat awam.

C. Otonomi Pusat Belajar Dan Pusat Kehidupan Masyarakat Yang Shaleh

Keshalehan Sulthan Musa dan perhatiannya yang sangat intens terhadap pendidikan dan pengalaman agamanya yang luas menjadi faktor yang sangat menentukan sebagai penyebab sulthan sangat memperhatikan perkembangan pengajaran agama di wilayahnya. Kebijakan yang menonjol dilakukan oleh Sulthan Musa sebagai sulthan yang ke V adalah mendirikan beberapa Mesjid di wilayah kesulthanan dan memperbaiki sistem peradilan syariah serta mengangkat Qadhi dan Mufti. Selain itu beliau juga mengadakan pendidikan agama di Istana yang wajib diikuti oleh semua keluarga kerajaan dan pembesar istana. Beliau sangat menghormati para ulama dan senang mengaji kepada ulama ulama tersebut. Sorang diantara ulama yang sangat dihormati dan menjadi guru beliau adalah tuan syech Abdul

Wahab. Pada awalnya beliau mengundang tuan syech ini untuk datang ke istananya untuk memberikan penerangan agama, beberapa kali tuan Syech diminta untuk datang dan memberikan pelajaran agama. Sampai akhirnya beliau meminta agar gurunya tersebut pindah menetap di Tanjung Pura.

Beberapa waktu kemudian permohonan Sulthan Musa dikabulkan oleh syech Abdul Wahab Rokani sehubungan tugasnya di kesulthanan Siak Riau telah selesai. Sejak itu secara intensif sulthan belajar kepada syech Abdul Wahab Rokani. Kecintaannya kepada pengembangan ilmu keagamaan serta pemikirannya yang jauh kedepan bagi pembinaan ummat, Sulthan memandang perlu pendidikan yang diperolehnya dapat juga diperoleh oleh rakyatnya. Pemikiran ini sejalan dengan tuan syech Abdul Wahab Rokani yang ingin mengembangkan pendidikan agama untuk masyarakat secara luas.

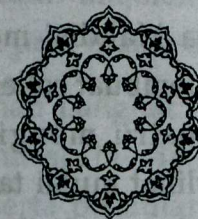
Mewujudkan obsesi ini maka mulailah dipikirkan untuk adanya suatu perkampungan yang menjadi pusat pendidikan yang dapat membina masyarakat secara luas dan menjadi model negeri religius. Maka dipilihlah suatu daerah di kawasan gebang untuk menjadi pusat pendidikan itu. Namun atas usul tuan syech sendiri dengan berbagai pertimbangan dipilih kawasan lainnya yaitu kawasan yang sekarang ini yang kita kenal dengan Basilam (Babussalam) Daerah itu terletak 7 km dari Kota Kesultanan Langkat.

Sulthan memberikan hak otonom bagi tuan syech Abdul Wahab mengembangkan wilayah Besilam atau Babussalam itu.

Areal hutan itu kemudian oleh Tuan Syeh dan pengikutnya serta para muridnya dikembangkan menjadi perkampungan yang memiliki otoritas penuh untuk

mengembangkan sistem kehidupan yang berbasis pada ajaran thariqat Naqsabandiyah. Jika raja raja di Jawa memberikan tanah lungguh kepada para ulama untuk dijadikan areal pesanteren maka gagasan sulthan langkat ini agak mirip dengan itu. Tetapi ternyata gagasan ini memiliki otoritas dan orisinilitasnya sendiri lebih dari tanah lungguh. Letak keunikannya adalah jika tanah lungguh diberikan untuk mendirikan pesanteren yang nanti tempat para santri menuntut ilmu. Sedangkan pemikiran sulthan justru adalah untuk adanya suatu wilayah/negeri yang sistemnya otonom berdiri sendiri dengan sistem sendiri dibawah otoritas tuan syekh.

Di wilayah ini tuan syekh dengan leluasa dapat mengembangkan ajaran Thariqat dan mengajarkan ilmu agama. Sulthan Musa sendiri secara rutin mengundang tuan Syekh ke Istana untuk membicarakan berbagai masalah agama dan kemasyarakatan. Secara rutin sulthan juga mengikuti ibadah suluk dibawah bimbingan Syekh Abdul Wahab. Keberadaan suatu wilayah otonomi dengan sistem kehidupan berbasis ajaran Tahariqat Naqsabandiyah adalah suatu gagasan penting. Keberadaan wilayah otonom ini ternyata menjadi sarana bagi masyarakat terutama yang usia lanjut untuk memperdalam agama dan memahami thariqat. Besilam atau Babus Salam muncul sebagai suatu daerah otonom yang sepenuh dibawah pembinaan dan pemerintahan yang dipimpin oleh tuan guru Babussalam. Beberapa kekhususan yang dilakukan oleh tuan guru diantaranya adalah sistem waktu disesuaikan dengan waktu makkah, serta peraturan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Tuan Guru Babussalam. Besilam sampai saat ini terus eksis dan menunjukkan pengaruh yang luas dikalangan masyarakat di Sumatera Utara.



BAB III

KEBIJAKAN MENGEMBANGKAN MADRASAH

A. Pendirian Madrasah dan Madrasah Khusus Puteri

Menurut Makdisi lembaga pendidikan Islam dalam bentuk Madrasah muncul pertama kali atas gagasan perdana menteri Bani Saljuk yang bernama Nizhamul Muluk. Bentuk lembaga pendidikan Madrasah ini merupakan tahap ketiga dari perkembangan kelembagaan Pendidikan dalam Islam setelah Mesjid dan Mesjid Akademi (Makdisi, 1986, 1123) Lebih lanjut Makdisi menyatakan model Madrasah ini menjadi inspirasi lahirnya *college* di Eropah pada abad XIII. Gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Nusantara dengan mendirikan Madrasah tidak langsung terinspirasi dari Nizam al Muluk tetapi lebih merupakan respon terhadap bentuk lembaga pendidikan kolonial dalam bentuk sekolah. Kepentingan untuk memajukan pendidikan Islam baik pendidikan di Mesjid dan pesanteren yang diselenggarakan dalam bentuk halaqah menjadi klasikal disebabkan sistem

klasikal lebih dapat menampung peserta didik dalam jumlah yang banyak dan mengenal penjenjangan sehingga lebih mudah merancang akselerasi pengajaran agama. Selain kata sekolah dalam bahasa eropah berarti tempat belajar jika dimaknai dalam bahasa Arab maka tempat belajar adalah Madrasah. Menarik bila Makdisi menyatakan Madrasah menginspirasi Eropah membuat college maka di Nusantara College atau School justru menginspirasi berdirinya Madrasah. Gejala ini terlihat mulai tahun 1909 yaitu sejak Syech Abdullah Ahmad mendirikan Adabiyah School. Adabiyah School hidup sebagai Madrasah (sekolah Agama) sampai tahun 1914. Pada tahun 1910 Thaib Umar mendirikan sekolah agama di Sungayang (daerah Batusangkar) dengan nama Madras School (Sekolah Agama) Mahmud Yunis mencatat bahwa sistem belajar di Madras School masih berbentuk Khalaqah.

Istilah Madrasah mulai digunakan oleh pada tahun 1915 oleh Zainuddin Labai yang mendirikan Diniyah School (Madrasah Diniyah). Kemudian tersebarlah madrasah-madrasah pada beberapa kota dan desa di Minangkabau dan Indonesia umumnya. (Mahmud Yunus, 63-64, 1986). Bila dilihat dari penggunaan kata Madrasah sebagai kata menunjukkan sekolah maka justru Jam'iyah Mahmudiyah lebih awal menggunakan istilah itu di Nusantara. Madrasah Maslurah atau madrasah Lil Banat telah dirintis pendiriannya sejak tahun 1879

Meskipun demikian masalah utama bukan siapa dan dimana lebih awal tetapi yang perlu dikemukakan dalam gagasan pembaharuan ini adalah suatu fakta yang tidak boleh dikesampingkan bahwa gagasan membuka lembaga pendidikan Madrasah di tanah air juga merupakan bahagian

buah dari pembaharuan yang dilancarkan Abduh dan kawan kawannya, yang pengaruhnya sebagaimana dikemukakan terdahulu telah menjalar keseluruh negeri Islam melalui kontak para jemaah haji yang menunaikan ibadah haji di Mekah dan juga melalui majalah wurwatul wusqa yang sampai juga ketangan para ulama di Nusantara.

Kedekatan Sulthan Langkat Abdul Jalil Rahmat Syah dengan ulama-ulama serta visinya tentang kemajuan pendidikan agama serta pegaulannya yang luas ke dunia internasional serta adanya usulan dari para ulama Istana dan para ulama yang mengajar di Istana dan di Mesjid menumbuhkan gagasan untuk mendorong organisasi pendidikan yang dibentuknya mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Madrasah. Madrasah yang dibuka tersebut memiliki ciri tersendiri yaitu telah meninggalkan sistem khalaqah dilang sungkan dengan sistem klasikal laiknya sekolah yang dikelola oleh penjajah yang kala itu tidak atau belum dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Gagasan ini mengingatkan kita pada pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan oleh Abdullah Ahmad dengan Adabiyah School di Sumatera Barat yang juga mengenalkan sistem klasikal dan meninggalkan sistem khalaqah.

Pada awalnya pendidikan untuk pelajar putera terpisah dengan pelajar puteri. Madrasah untuk puteri diberi nama Madrasah Maslurah (Madrasah Lil Banat), nama ini diambil dari nama permaisuri sulthan sebagai penghargaan kepada sang isteri, selanjutnya untuk putera diberi nama Madrasah Azizi. Pimpinan Madrasah diserahkan kepada H. Muhammad Nur Abdul Karim. Beberapa tahun kemudian diserahkan kepada H. Muhammad Ziadah seorang ulama yang baru saja

menyelesaikan studinya di Mekah. Pergantian ini dilaksanakan berhubung karena H. Muhammad Nur Abdul Karim diangkat sulthan sebagai Mufti besar kerajaan Langkat. Dalam menjalankan tugasnya beliau dibantu oleh beberapa orang ustaz yaitu H. Tajuddin, H. Jamaluddin, Bilal Afid dan H. Abdul Rahim Abdullah, sedangkan H. Muhammad Nur disamping menjabat sebagai mufti tetap juga mengajar di Madrasah.

Dibawah kepemimpinan H. Muhammad Ziadah popularitas Madrasah semakin meluas. Pelajar dari berbagai daerah termasuk semenanjung Malaya mulai berdatangan. Diberitakan pada tahun 1914 itu gedung Madrasah yang ada sudah tidak mampu lagi menampung pelajar yang semakin banyak belajar di lembaga pendidikan ini. Maka pada tahun itu juga disepakati untuk mendirikan gedung baru, dengan persetujuan sulthan gedung dibangun ditanah yang diwakafkan beliau seluas 4,3 ha terletak di kampung dalam Tanjung Pura. Sebagai modal awal terkumpul dana sumbangan dari dermawan berjumlah f. 22.000 gulden. Gedung yang dibangun terdiri dari 8 lokal dan 1 aula besar yang berada di tingkat atas. Selanjutnya untuk menuntas penyelesaian pembangunan sulthan memberikan bantuan secukupnya. Pada tahun 1917 bangunan tersebut selesai dengan biaya f. 43.903,40,- gulden. Gedung yang megah tersebut diberi nama Mahmudiyah mengambil nama putera sulthan Abdul Aziz yang bernama Mahmud Abdul Jalil Rahmad Syah. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah ini H. Muhammad Ziadah sebagai pimpinan Madrasah menggunakan kurikulum yang dipakai di Mekah. Mungkin erat hubungannya karena beliau adalah tamatan dari Mekah.

Seiring dengan makin banyaknya pelajar maka untuk penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu untuk menambah

guru baik secara kuantitas maupun kualitas. Pimpinan dan guru Madrasah serta sultan berinisiatif untuk mendatangkan guru langsung dari Timur Tengah. Pada tahun 1922 usaha untuk mendapatkan tenaga pendidik dari Timur tengah membuahkan hasil. Tercatat empat orang tenaga pengajar dari Mekah yaitu (1) Syech Ahmad Bukur, (2) Syech Abdurrahman, (3) Syekh Said Ahmad dan (4) Syech Ibrahim Al-Hindy.

Popularitas Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil Khairiyah semakin meningkat terutama setelah adanya gedung dan tenaga pengajar dari luar negeri itu. Kondisi ini menyebabkan para pengasuh mendesak sulthan untuk mendirikan gedung yang baru dan mendirikan asrama. Atas usul tersebut sulthan memprakarsai berdirinya gedung baru yang berlantai dua yang diberi nama dengan madrasah Aziziah dan juga asrama bagi para pelajar dari jauh dan siswa yatim. Dengan demikian Jam'iyah Mahmudiyah merupakan satu-satunya madrasah dengan sistem modern dan terasrama. Sampai tahun 1923 tercatat Jam'iyah Mahmudiyah telah menampung 1500 pelajar dari berbagai daerah seperti Riau, Jambi, Tapanuli Selatan, Aceh, Palembang dan juga dari daerah semenanjung antara lain kelantan, Selangor, Johor, kedah (Sekarang Malaysia) dan ada juga dari Patani, Yala (thailand Selatan) Walau sudah memiliki tiga gedung yang cukup besar namun seiring bertambahnya pelajar maka untuk jaminan kualitas pembelajaran dipandang perlu penambahan gedung lagi untuk keperluan itu asrama anak yatim sewaktu-waktu juga dipakai untuk tempat belajar yang disebut dengan Madrasah Putih

B. Pengembangan Sistem Jenjang Pendidikan dan Struktur Kurikulum

Dalam rentang waktu yang panjang penyelenggaraan proses belajar dalam pendidikan Islam berlangsung dengan

sistem pengkajian kitab. Pelajar harus menguasai secara tuntas suatu kitab barulah diperkenankan mempelajari kitab lainnya yang diihtiraf oleh guru lebih luas dan dalam pembahasannya. Hal ini berlangsung dalam mempelajari setiap disiplin ilmu baik bahasa, al-qur'an, hadis, fiqh dan berbagai cabang ilmu atau funun lainnya. Biasanya dalam mempelajari kitab tersebut dilakukan dengan model khalafah dimana siswa-siswa mendengar syarahan guru dan siswa menghafal serta mencatat semua penjelasan guru. Cara ini disebut dengan metode syarahan atau di pesanteren di pulau Jawa disebut sorogan. Dapat juga dalam bentuk siswa datang kepada gurunya membaca kitab dan menyampaikan artinya kemudian guru mengkoreksi bacaan maupun pemahaman siswanya itu dan memberikan penjelasan semestinya. Kemudian siswa mencatat semua keterangan guru itu. Proses berlangsung bergantian secara orang per orang atau bersifat individual. Setelah selesai seluruhnya mendapat kesempatan atau giliran, guru memberikan penjelasan dan pendapatnya. Seluruh siswa duduk dan mengikuti dengan seksama dan mencatat keterangan guru tersebut.

Jika diperhatikan dokumen dan keterangan yang ada maka pada Jam'iyah Mahmudiyah justru sistem ini diperbaharui dengan membuat penjenjangan dengan cara meklassifikasi semua kitab pelajaran atau funun yang akan dipelajari dan dijadikan suatu tahapan atau jenjang yang harus dilalui. Dengan demikian setiap jenjang cabang ilmu yang akan dipelajari ditetapkan demikian pula kitab-kitabnya. Terdapat tiga jenjang yang harus dilalui oleh setiap siswa yaitu jenjang persiapan (madrasah Tajhiziyah) dan jenjang dasar (madrasah Ibtidaiyah) dan jenjang atas (Madrasah Tsanawiyah). Sejak tahun 1920 dibuka jenjang Qismul Aly

Masing jenjang di tetapkan waktu yang harus dilalui siswa yaitu

Jenjang Tazhijyah empat tahun

Jenjang Ibtidaiyah empat tahun

Jenjang Tsanawiyah tiga tahun

Dan jenjang Qismul Ali dua tahun sebelum ada jenjang qismul Aly jenjang Madrasah Tsanawiyah lama belajarnya lima tahun.

Terdapat keterangan yang berbeda tentang Madrasah madrasah Jam'iyah Mahmudiyah ini Mahmud Yunus menyatakan bahwa Madrasah yang pertama adalah Madrasah Maslurah dengan lama belajar 7 tahun (kelas I s/d VII) murid yang diterima belajar adalah murid yang telah tamat SR 5 tahun dan telah pandai baca tulis Al-Qur'an (Mahmud Yunus, 185,1976)

Sedangkan Madrasah Aziziyah mulai tahun 1923 merupakan sambungan dari Madrasah Maslurah terdiri dari tiga bahagian yaitu Tajhizi lama belajar 4 tahun, Ibtidai lama belajar 4 tahun dan Tsanawi (muallimin) lama belajar 5 tahun. Jumlah lama belajar di Madrasah Aziziyah 13 tahun. Pada bahagian lain Mahmud Yunus mencatat bahwa Tajhizi dan Ibtidai dinamai Madrasah Maslurah dan bahagian Muallimin /Tsanawi dinamai 'Aziziah (Mahmud Yunus, 186,1976)

Mungkin penjelasan ini berawal dari sistem bi-education yang dikembangkan Jam'iyah Mahmudiyah. Memisahkan antara pelajar laki-laki dan perempuan. Madrasah lil banat sesungguhnya adalah bahagian dari Madrasah Maslurah yang khusus untuk pelajar puteri. Sejak tahun 1923 dengan berdirinya gedung baru maka pemisahan ini menjadi lebih jelas pada gedung Madrasah Maslurah untuk pelajar puteri dan

pelajar putera di Madrasah Aziziah. Sedangkan penjenjangan Madrasah tersebut adalah sebagaimana dijelaskan diatas.

Berdasarkan data yang dijumpai dari dokumen yang ada di Jam'iyah Mahmudiyah kurikulum yang dipakai di Jam'iyah Mahmudiyah untuk tiap tingkatan itu adalah sebagai berikut:

Kurikulum Tingkat Tajhiizi

Tahun 1912-1944

Pelajaran	Kelas			
	I	II	III	IV
1. Al-Qur an		4	4	4
2. Huruf Hijaiyah		5	-	-
3. Fiqih	3	3	3	3
4. Tauhid	3	3	3	3
5. Menulis Arab	1	2	2	2
Menulis Latin	1	2	2	2
6. Tarikh	-	1	2	2
7. Tajwid	-	-	2	2
8. Lughah	3	3	3	3
9. Tasrif	--	-	2	2
10. Nahu				2
11. Muhadasah			1	1
12. Terjemah	-	2	2	2
13. Hadist			2	2
14. Hisab	1	2	2	2
15. Takhtim	1	1	1	1
16. Pel. Shalat	1	1	1	1
17. Ilmu Bumi	-	2	2	2
18. Akhlaq	-	1	1	1
19. Menghafal				
Bacaan shalat	4	4	3	3
Ayat-ayat	4	4	3	3
	27	34	40	40

Sumber: hasil kompilasi dari dokumen Jam'iyah Mahmudiyah Li

Thalabil Khairiyah

Menurut Mahmud Yunus berdasarkan penjelasan dari Syekh Abdullah Affuddin yang menjadi pimpinan Madrasah sejak tahun 1927 s/d tahun 1942 kurikulum Tajhiziah Maslurah adalah sbb:

No	Nama Ilmu	Jumlah jam pelajaran dalam seminggu				Ket
		Kelas				
		I	II	III	IV	1 Jam Pe La Jar an 45 Me Nit
1	Hijaiyah	6				
2	Membaca huruf Arab	6	4	3	1	
3	Menulis	6	3	1	1	
4	Bahasa Arab	2	2	3	3	
5	Menghafal ayat	-	2	-	2	
6	Figih	-	2	3	3	
7	Tauhid	-	2	2	2	
8	Tashrif	-	-	2		
9	Tajwid	-	-	1	4	
10	Sharaf	-	-	-	2	
11	Al-Qur an	-	6	3	3	
12	Tarikh	-	-	3	3	
13	Tahsinul Khat	-	-	2	2	
14	Membaca Huruf Latin	6	4	3	1	
15	Menuis Huruf Latin	6	3	2	1	
16	Berhitung	2	4	3	3	
17	Menggambar	1	2	2	1	
18	Ilmu Bumi	--	-	2	3	
19	Imlak	6	1	-	1	
20	Muhawarah	1	-	-	-	
	Jumlah	42	35	36	37	

Sumber Mahmud Yunus, 187, 1986

Ada perbedaan dari kedua data tersebut namun hal ini mungkin sejak tahun 1927 telah diadakan penyempurnaan

Kurikulum Tingkat Ibtidaiyah 1912 -1944

No	Nama Ilmu	Jumlah jam pelajaran dalam seminggu				Ket
		Kelas				
		I	II	III	IV	
1	Tauhid	3	3	2	2	
2	Fiqh	2	2	2	2	
3	Tafsir	3	3	3	3	
4	Nahu	3	3	3	3	
5	Sharaf	2	2	2	2	
6	Bayan	2	2	2	2	
7	Mantiq	2	2	2	2	
8	Hadist	2	2	2	2	
9	Muthalaah	2	2	2	2	
10	Muhadasah	2	2	2	2	
11	Mahfuzat	1	1	1	1	
12	Ushul Fiqh	2	2	2	2	
13	Tarikh	2	2	2	2	
14	Akhlak	2	2	2	2	
15	Musthalah	1	1	1	1	
16	Ilmu Bumi	1	1	1	1	
17	Imlak	1	1	1	1	
18	Insyak	2	2	2	3	
19	Khat	1	1	1	1	
20	Hisab	1	1	1	1	
21	Faraidh	1	1	1	1	
		39	39	39	39	

Sumber: hasil kompilasi dari dokumen Jam'iyah Mahmudiyah

Adapun kitab yang dijadikan rujukan selain yang ditulis sendiri oleh guru adalah

No	Nama Ilmu	Nama Kitab
1	Tauhid	Matan Sanasiah Kifayatul Awam Baijuri

2	Fiqh	Ghayatul Taqrib Fathul Qarib
3	Tafsir	Jalalain
4	Nahu	Nahu Wadhih Qawaidul Arabiyah
5	Sharaf	Sullam Kailani
6	Bayan	Shawi
7	Mantiq	Idahul Mubham
8	Hadist	Abi Jamrah
9	Muthalaah	Qurratur Rasyidin
10	Muhadasah	Muhadasah
11	Mahfuzat	Mahfuzat
12	Tarikh	Khulasah Nur Yasim Nurul Yaqin
13	Akhlak	Taisirul Khuluq
14	Faraidh	Ilmu Faraidh

Sumber: hasil kompilasi dari dokumen Jam'iyah Mahmudiyah

Selanjutnya pada tahun 1927 terjadi beberapa perubahan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran di tingkat Ibtidaiyah dan tsanawiyah termasuk juga buku rujukan dan pegangan guru serta buku dasas

Kurikulum Tingkat Ibtidaiyah 1927 -1942

No	Nama Ilmu	Jumlah jam pelajaran dalam seminggu				Ket
		Kelas				
		I	II	III	IV	
1	Nahu	3	3	3	3	1
2	Sharaf	2	2	2	2	Jam
3	Muthalaah	4	4	3	2	Pe
4	Imlak	1	1	1	1	La
5	Insya'	2	2	1	1	Jar
6	Balaghah	-	-	2	2	an
7	Arudh	-	-	2	2	45
						Me

8	Tauhid	2	2	2	2	Nit
9	Fiqh	4	4	4	3	
10	Tafsir	?	?	?	?	
11	Hadist	2	2	2	2	
12	Manthiq	-	-	-	2	
13	Akhlaq	2	2	2	2	
14	Khitabah	1	1	1	1	
15	Tajwid	1	1	1	1	
16	Khat	1	1	1	1	
17	Tarikh	-	-	-	1	
18	Sejarah Nabi Nabi	2	2	2	-	
19	Berhitung	2	1	1	1	
20	Ilmu Bumi	1	1	1	1	
21	Ilmu Alam	1	1	1	1	
22	Ilmu Tumbuh Tumbuhan	1	1	1	1	
23	Ilmu Hewan	1	1	1	1	
24	Ilmu Bangun	-	1	1	1	
25	Ilmu Kesehatan	1	1	1	1	
	Jumlah	34	34	36	36	

Sumber Mahmud Yunus, 187, 1979

Kurikulum Tingkat Tsanawiyah 1916 -1944

No	Nama Ilmu	Jumlah jam pelajaran dalam seminggu				Ket
		Kelas				
		I	II	III	IV	
1	Tauhid	3	3	3	3	
2	Fiqh	3	3	3	3	
3	Ushul Fiqh	2	2	2	2	
4	Tafsir	2	2	2	2	
5	Nahu	3	2	2	2	
6	Sharaf	2	2	2	2	
7	Bayan	2	2	2	2	
8	Mantiq	2	2	2	2	
9	Balaghah	1	2	2	2	
10	Ma'ani	-	1	1	1	
11	'Arudh	1	1	1	1	
12	Badi	1	1	1	1	

13	Hadist	2	2	2	2
14	Mushtalah Hadis	1	1	1	1
15	Muthalaah	2	2	2	2
16	Lughah	2	2	2	2
17	Akhlaq/Tasawuf	2	2	2	2
18	Tarikh	2	2	2	2
19	Insya'	2	2	2	2
20	Muhadasah	1	1	1	1
21	Ilmu Bumi	1	1	1	1
22	Adabul Bahs	1	1	1	1
23	Tarbiyah	1	1	1	1
24	Tarikh Falsafah	1	1	1	1
	Jumlah	41	41	41	41

Sumber: hasil kompilasi dari dokumen Jam'iyah Mahmudiyah

Buku/kitab yang dijadikan pegangan atau sumber
bahan pelajaran adalah :

No	Nama Ilmu	Nama Kitab
1	Tauhid	Kifayatul Awam Baijuri Dasuqi
2	Fiqh	Minhajut Thalibin
3	Ushul Fiq	Nihatus Sal
3	Tafsir	Jamal
4	Nahu	Khudri
5	Sharaf	Kailani
6	Bayan	Jauhar Maknun
7	Mantiq	Shabban
8	Ma'ani	Jauhar Maknun
9	Arudh	Jauhar Maknun
10	Badi	Badi
11	Hadist	Fathul Mubdi
12	Musthalah Hadis	Baiquniah
13	Muthalaah	Quraatur Rasyidin IV

14	Akhlaq/Tasawuf	Nazlatu Al-Nazirin
15	Ilmu Bumi	Jughrafiah
16	Adabul Bahs	Syarah Waladiyah
17	Tarikh Falsafah	Tarikh Falsafah

Sumber: hasil kompilasi dari dokumen Jam'iyah Mahmudiyah. Catatan tersebut tidak menjelaskan pengarang dan penerbit kitab tersebut

Menurut tulisan Mahmud Yunus setidaknya yang dipahami beliau Madrasah Tsanawiyah sama dengan Madrasah Aziziyah beliau menuliskan Kurikulum Madrasah Aziziyah tahun 1927-1942 adalah

No	Nama Ilmu	Jumlah jam pelajaran dalam seminggu				
		Kelas				
		I	II	III	IV	V
1	Nahu	2	2	2	2	2
2	Sharaf	2	2	2	2	2
3	Wadha	1	1	1	-	-
4	Balaghah	2	2	2	2	2
5	Tauhid	3	2	2	2	2
6	Fiqh	2	2	2	2	2
7	Ushul Fiqh	2	2	2	2	2
8	Tafsir	2	2	2	2	2
9	Hadist	2	2	2	2	2
10	Mushtalah Hadis	2	2	-	-	-
11	Tarikh Tasyri"	-	-	-	1	1
12	Adabul Bahs	-	-	-	1	1
13	Tasawuf	-	-	1	1	1
14	Al-Wa; zhu wal Irsyad	-	-	-	1	1
15	Falsafah	-	-	1	1	1
16	Adabul Lughah	1	1	1	1	1
17	Insya'	1	1	1	-	-
18	Manthiq	2	2	2	2	2

19	Tarikh	1	-	-	-	-
20	Sejarah Umum	-	1	1	2	2
21	Ilmu Bumi	1	1	1	1	1
22	Ilmu Hewan	1	1	1	1	1
23	Ilmu Tumbuh-tumbuhan	1	1	1	1	1
24	Ilmu Alam	1	1	1	1	1
25	Ilmu Bangun	1	1	1	-	-
26	Berhitung	1	1	1	1	1
27	Miqat (falakiyah)	1	1	1	1	1
28	Tarbiyah	1	1	1	1	1
29	Ilmu Kesehatan	1	1	1	1	1
30	Ilmu Jiwa	1	1	1	1	1
31	Taawwun (koperasi)	1	1	1	-	-
32	Gerak Badan	-	-	-	1	1
33	Ilmu Hayat (manusia)	1	1	1	1	1
		36	35	36	37	37

Sumber Mahmud Yunus, 189-190, 1979

Kitab-kitab yang dipakai pada Muallimin/Madrasah Tsanawiyah Aziziyah adalah sebagai berikut :

1. Al-Mahalli (Qullyubi)
2. Al-Asnawi dan Jami;ulk Jawami'
3. Ummmul Barahim (Dasuqi)
4. Ibnu' Aqil (Khudri)
5. Shabban Malawi
6. Ruhul Ma'ani
7. Fathul Bari
8. Baiquniah
9. Jauharul Maknun

10. Mukhtashar Ihya'
11. Ilmu Wadha'
12. Kitab Ilmu Akhlaq
13. Adabul Bahtsi
14. Tarikh Tasyri'
15. Maqulat
16. Ilmun Nafs.
17. Dan lain-lain

(Mahmud Yunus, 190,1979)

Pada kurikulum tercantum sejumlah pelajaran umum dan juga ilmu ilmu yang diperlukan untuk keguruan seperti ilmu jiwa, Tarbiyah atas dasar itulah mungkin Mahmud Yunus dalam tulisannya itu menyebutkan Mu'allimin/Tsanawiyah Aziziyah.

Dari berbagai sumber di Jam'iyah Mahmudiyah tidak dijumpai istilah Muallimin ini. Hanya ada disebutkan bahwa sejak tahun 1920 Tsanawiyah dipecah menjadi dua; Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar tiga tahun dengan kurikulum sebagaimana di tampilkan pada halaman 25 buku ini, dan Qismul Aly dengan lama belajar dua tahun.

Adapun Kurikulum Qismul Aly 1920-1944 adalah sebagai berikut:

No	Nama Ilmu	Buku	Jumlah jam Pelajaran dalam seminggu	
			Kelas	
			I	II
1	Tauhid	Dasuqi	4	4
2	Fiqh	Sarqawi Minhajud Thalibin	4	4

3	Ushul Fiqh	Jamal	3	3
4	Tafsir	Fathul Mubdi	3	3
5	Hadist	Nihayatul Sul	3	3
6	Nahu	Chundri	3	3
7	Manthiq	Shaban	2	2
8	Balaghah	Jauhar Maknun	2	2
9	Badi'	Jauhar Maknun	1	1
10	Ma'ani	Jauhar Maknun	1	1
11	Arudh	Huul Arudh	1	1
12	Tarikh	Nur Yaqin	3	3
13	Tasawuf	Nazhatun Nazhirin	2	2
14	Adabul Bahs	Syarhun Waladiyah	3	3
15	Tarbiyah	Hidayatul Mudarris	1	1

Sumber: hasil kompilasi dari dokumen Jam'iyah Mahmudiyah

Jika dicermati kurikulum atau pada waktu itu disebut rencana pengajaran yang dikembangkan pada Jam'iyah Mahmudiyah secara tidak langsung menjadi acuan madrasah yang ada di luar Jam'iyah Mahmudiyah Langkat. Hal ini erat hubungannya karena sebahagian dari para guru dan pendiri Madrasah tersebut adalah alumni dari Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah yang setelah menyelesaikan pendidikannya yang kembali ke daerahnya dan mengasuh ataupun mendirikan Madrasah di daerahnya masing masing.

C.Sistem Ujian/Munaqasah

Penilaian hasil belajar sudah lama dikenal dalam sistem pendidikan Islam bahkan dapat dinyatakan sudah diperaktekkan sejak awal pengajaran itu sendiri dilangsung pada ketika mengucapkan atau membaca ayat ayat secara tartil maupun ketika menghafalkan dalam bentuk tadarrus ayat ayat Al-Quran yang turun secara berangsur angsur selama kerasulan Muhammad SAW lebih kurang 23 tahun baik ketika rasul berada di Mekah maupun setelah hijrah ke

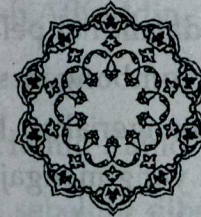
Madinah. Bentuk penilaian untuk mengetahui keakuratan bacaan baik dari lafaz dan makhraj serta kelengkapan ayat-ayat menjadi kegiatan yang inherent melekat pada kegiatan membaca ataupun belajar membaca dan menulis serta memahami ayat-ayat Al-qur'an tersebut.

Kegiatan mempelajari Al-Qur'an itu sendiri menjadi materi utama dalam kurikulum pendidikan Islam sejak masa awal. Kelanjutan dari mempelajari al-qur'an inilah yang selanjutnya melahirkan kajian-kajian khusus dalam bentuk tafsir Al-Qur'an dan kemudian kajian tentang syariat atau hukum Islam yang kemudian dikenal dengan ilmu fiqh. Kajian tentang hadis Rasul muncul belakangan setelah adanya upaya untuk melakukan pengkodifikasian hadis karena makin banyaknya hadis-hadis maudhu' (palsu). Kajian ini melahirkan ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Kajian hadis memperkuat kajian tentang ilmu tafsir yang kemudian salah satunya adanya kajian tafsir bil ma'sur sebagai kajian kritis tentang tafsir ayat-ayat al-Qur'an berdasar riwayat atau pendapat sahabat.

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sudah dikuasai semua pelajaran itu secara tuntas dan benar. Tujuannya bukan saja untuk mengetahui kemampuan sang penuntut ilmu tetapi lebih jauh lagi adalah untuk menjamin apakah pengetahuannya itu dipahami secara benar atau tidak oleh penuntut ilmu. Jadi penilaian lebih pada suatu tanggung jawab kepada kebenaran dan kemanusiaan agar nilai yang diajar itu benar-benar dapat mengangkat harkat martabat manusia dan kemanusiaan dan tidak menimbulkan penyimpangan ketika nanti ditransformasi kepada yang lain. Pada madrasah Jamiyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah sejak berdirinya mulai dari Madrasah Li Banat 1879 telah

mengembang sistem ujian atau penilaian ada dua model sistem penilaian yang dikembangkan pertama penilaian proses pembelajaran dan kedua penilaian akhir. Penilaian pada proses pengajaran dilakukan dalam bentuk Tamrinat ujian yang diberikan setiap selesai satu pembahasan. Kemudian penilaian akhir adalah penilaian ketika murid telah menyelesaikan satu tingkatan untuk memasuki kelas yang di atasnya ataupun memasuki madrasah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu hal yang menarik dalam pelaksanaan ujian akhir ini tidak dilakukan oleh guru yang mengajar tetapi dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan untuk tugas itu. Materi ujian terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ujian mengenai penguasaan kitab atau materi ajar dan bagian kedua ujian pengamalannya atau praktik. Melihat sistem ujian yang dilaksanakan di madrasah Jamiyah Mahmudiyah ini maka tampak sekali dalam bidang penilaian ini juga telah terjadi pembaharuan yang sangat menonjol mengingat masa itu di Nusantara belum ada Madrasah yang mengembangkan sistem ujian seperti tersebut.

Setelah menamatkan istana lama dan menunjuk para guru sebagai tenaga pendidik dan penanggung jawab pengelolaan. Segera setelah lembaga ini bertambah maju dan para penuntut ilmu semakin bertambah. Dengan kemajuan ini tenaga pendidik yang ada H. Muhammad Zaidah sebagai kepala Madrasah dibantu dengan H. Tajuddin, H. Jamaluddin, Bilal Afid, dan H. Abdul Rahim Abdullah merasa tidak cukup waktu untuk mendidik murid secara lebih baik. Meskipun H. Muhammad Nur Abdul Karim sebagai kepala Madrasah pertama dan telah diangkat menjadi Menteri masih turut serta mengajar namun kekurangan ini dari hari ke hari makin



BAB IV

MEMBANGUN KERJASAMA PENDIDIKAN

A. Kerjasama Kelembagaan Dan Ketenagaan Pendidikan

Sambutan dan dukungan masyarakat serta ulama telah menambah semangat sulthan untuk memperkuat lembaga Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah. Setelah mewakafkan istana lama dan menunjuk para guru sebagai tenaga pendidik dan penanggung jawab pengelolaan. Segera setelah lembaga ini bertambah maju dan para penuntut ilmu semakin bertambah. Dengan kemajuan ini tenaga pendidik yang ada H.Muhammad Ziadah sebagai kepala Madrasah dibantu dengan H.Tajuddin, H.Jamaluddin, Bilal Afid, dan H.Abdul Rahim Abdullah merasa tidak cukup waktu untuk mendidik murid secara lebih baik. Meskipun H. Muhammad Nur Abdul Karim sebagai kepala Madrasah petma dan te;ah diangkat menjadi Mufti masih turut serta mengajar namun kekurangan ini dari hari ke hari makin

terasa. Berdasarkan keperluan tambahan tenaga pendidik ini Sulthan mengupayakan adanya tenaga pendidik dari Timur Tengah. Pada saat itu tampaknya tenaga pendidik yang dilamar adalah dari Mekkah. Kecenderungan ini dapat didorong oleh karena telah ada hubungan kerajaan dengan Saudi Arabia, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah haji. Tercatat beberapa kali rombongan sulthan dan keluarga serta ulama berangkat mengerjakan haji ke Mekkah. Selain itu beberapa orang guru yang mengajar di Istana dan juga di Madrasah Maslurah adalah ulama yang telah mengecap pendidikan di Mekkah. Usaha sulthan berhasil pada tahun 1922 Jam'iyah Mahmudiyah secara resmi mendapat empat orang tenaga pendidik dari Mekkah yaitu :

- a. Syech Ahmad Bukur
- b. Syech Abdurrahman
- c. Syech Said Ahmad
- d. Syech Ibrahim Al Hindy

Mereka diberikan gaji sebesar 200 gulden setiap bulannya. Jumlah ini jauh lebih besar dari tenaga pendidik Madrasah lainnya yang berkisar 75 Gulden per bulan.

Kehadiran tenaga Pendidik ini telah meningkatkan minat dan pengaruh Jam'iyah Mahmudiyah sebagai lembaga pendidikan Islam yang bermutu.

B. Bea Siswa Belajar Keluar Negeri

Selanjutnya untuk rencana peningkatan mutu pendidikan di Madrasah ini dalam jangka panjang Sulthan mengambil kebijakan untuk memberikan bea siswa belajar keluar negeri kepada siswa-siswa yang rajin dan terpintar.

Mereka yang terpilih memperoleh bea siswa belajar dikirim untuk mendalami ilmu ke universitas Al-Azhar di Mesir. Diantara mereka yang terpilih untuk dikirim pertama pada tahun 1922 adalah ;

- a. Syech H.Abdullah Afifuddin
- b. Syech H. Abdurrahim
- c. Syech H Abdul Hamid Zahid

Masing-masing sebelum diberangkat telah dipercaya menjadi guru bantu di Madrasah Jam'iyah Mahmudiyah.

Pengiriman guru untuk belajar ke Al-Azhar terus berlanjut pada tahun 1925 dikirim pula

- a. H. Ibrahim Abdul Halim
- b. H.M.Salim Fachri
- c. H.Muhammad Dahlan

Selain ke Al-Azhar pada tahun ini juga dikirim O.K.Salamuddin untuk belajar ke Universitas Sarbone di Paris, Perancis.

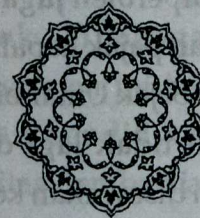
Tahun 1933 mereka yang tugas belajar ke Al-Azhar telah berhasil menyelesaikan studinya dan kembali ke Tanjung Pura untuk memperkuat dan memajukan Jam'iyah Mahmudiyah. Syech H.Abdullah Afifuddin disertai untuk memimpin Madrasah Mahmudiyah dan Aziziyah, sedangkan Syech H.Abdurrahim Abdullah dipercaya memimpin madrasah Maslurah lil Banat.

Tenaga pendidik di Jam'iyah Mahmudiyah semakin lengkap dengan guru-guru tamatan Mekah dan juga guru-guru tamatan Al-Azhar seluruhnya telah berhasil menyelesaikan studi dan kembali berkhidmat di Jam'iyah

Mahmudiyah. Keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas ini tentunya menjadi faktor menentukan untuk melahirkan tamatan yang cerdas yang kualitasnya menyamai jika tidak dapat dikatakan melebihi tamatan dari lembaga pendidikan di luar negeri.

Mereka para alumni Jam'iyah Mahmudiyah inilah yang kemudian menjadi guru di Jam'iyah pada priode selanjutnya dan juga menjadi tokoh tokoh pendidikan Islam dan ulama di kawasan Sumatera Timur dan sampai ke semenanjung Malaya (sekarang Malaysia).

Tampaknya kerjasama dan bea siswa keluar negeri ini tidak berlanjut lagi setelah pasca kemerdekaan. Terutama setelah Madrasah terpaksa menghentikan kegiatan pada tahun 1942 karena penjajahan Jepang. Terlebih lagi setelah kesulthanan Langkat lumpuh setelah gejolak perjuangan liar aktivis kemerdekaan yang menghancurkan semua aset dan pengaruh kesulthanan Langkat. Gerakan ini diorganisir kelompok kiri (baca komunis) (Johar, 23, 2011)



BAB V

PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN

A. Zakat Infaq Sadaqah Dan Wakaf Sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan

Hampir seluruh bangsa di dunia mendukung sepenuhnya pendidikan adalah instrumen langsung untuk peningkatan kualitas hidup dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk kemajuan bangsa. Dalam Islam Pendidikan diletakkan sebagai tanggung jawab setiap pribadi, masyarakat dan juga pemerintah. Untuk menjalankan tanggung jawab itu dan juga untuk keperluan membangun kemashlahatan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan ajaran Islam menganjurkan untuk mengeluarkan infaq, sedeqah dan zakat.

Infaq, sedeqah adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan memberikan dana sukarela untuk kepentingan sosial oleh siapa saja tanpa melihat kaya atau miskin. Sedangkan zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang tertentu dari

hasil usaha yang diperoleh ataupun dari harta yang dimiliki yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta benda dan penghasilan yang memenuhi ketentuan nisab berzakat Infaq bersifat suka rela (sunnat) sedangkan zakat bersifat wajib.

Pendanaan sosial diperoleh juga dari sebahagian harta rampasan perang (fa'i) dan pajak kepala dari orang kafir yang dilindungi (kafir zimmy). Sejak Umar bin Khatthab memerintah fa'i dalam bentuk tanah tidak lagi dibagi-bagikan, tetapi menjadi milik negara dan disewakan kepada orang yang mau menggarapnya. Sedang barang bergerak 1/5 untuk kas negara yang digunakan untuk kepentingan sosial. Sumber lain adalah pajak penghasilan/pendapatan dan pajak perlindungan. Sumber ini masuk ke kas negara dan dipergunakan untuk kepentingan sosial termasuk pendidikan. Sedangkan zakat masuk ke Baitul mal dipakai sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan Islam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa Umayyah berbagai khalaqah dan mesjid dibelanjai dengan dana dari baitul mal (Ahmad Syalabi, 121, 1889) Begitu pula masa Abbasiyah maupun Fatimiyah di Mesir dan Umayyah di Spanyol. Anggaran belanja mesjid jami' dan mesjid Khan dibelanjai negara, dialokasikan dari hasil zakat dan pengutipan pajak.

a. Zakat bagi pengembangan Pendidikan Islam

Surat al-Mudatsir ayat 1-5 menyerukan agar dilakukan secara sistematis usaha pemberdayaan pendidikan dengan perintah meninggalkan ketertutupan (selimut) dan melaksanakan pengajaran. Kata berselimut dapat berarti bersumbunyi, tidak terang-terangan tetapi juga dapat bermakna wawasan yang subjektif

normatif ditinggalkan berubah menjadi objektif empirik. Keyakinan mitos dan sakramentalis harus ditinggalkan dan segera beralih kepada iman dan amal shalih dengan melaksanakan pengajaran. Pada ayat itu dijelaskan pula secara jelas orientasi pengorganisasian pendidikan itu dalam bentuk (1) mengagungkan Allah dalam orientasi yang pertama ini terkandung makna bahwa pengorganisasian pendidikan haruslah merupakan karya atau aktivitas pembelajaran yang bersifat ibadah kepada Allah yang memberi kemaslahatan dan kesempurnaan, hidup manusia (2) membersihkan apa saja yang dipakai atau dipergunakan. Hal itu bermakna meningkatkan kualitas kemurnian kehidupan manusia di jagat raya ini, (3) menghapus segala bentuk kejahatan, kekejian dan over eksploitasi ataupun pamrih.

Orientasi kedua menunjukkan fungsi pendidikan Islam adalah membersihkan jiwa, dan aqal dari perikehidupan kejahiliyah an. Sedangkan membersihkan harta dengan berzakat berorientasi untuk menumbuhkan masyarakat berkesejahteraan sosial. Kata berselimut dapat berarti bersumbunyi, tidak terang-terangan tetapi juga dapat bermakna wawasan yang subjektif normatif ditinggalkan berubah menjadi objektif empirik. Keyakinan mitos dan sakramentalis ditinggalkan beralih kepada iman dan amal shalih dengan melaksanakan pengajaran. Perintah membersihkan semua yang dipakai (rahmat dan nikmat Allah) merupakan dasar dari perintah selanjutnya untuk mengeluarkan zakat yang juga bermakna membersihkan harta dari hak-hak orang lain Perintah ini bukan saja ma'qul (diterima penalaran), tetapi juga ma'mul (aplikabel), dan diterima

logika sejarah dapat dilaksanakan serta dapat dilihat hasilnya, diukur, dianalisis dalam kerangka kerja sistem. Ditinjau dari segi artinya zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan sesuai dengan dinyatakan Al-Qur'an.

Kebersihan harta berarti memisahkan hak-hak orang lain pada harta milik yang secara tak langsung ikut andil dalam proses dan juga faktor alam yang tak terbayar. Faktor modal tak terbayar inilah yang dinyatakan diberikan kepada mustahiq zakat sesuai petunjuk Allah.

Zakat dari makna lughawy berarti pertumbuhan karenadengan proses itu terjadi sirkulasi keberlangsungan fungsi sosial uang dan harta atau terjadi mekanisme pasar. Allah menyatakan *Seyogyanya kekayaan itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antara kamu.* QS. Al-Taubah, ayat 60

Ibnu Khaldun berasumsi bahwa dengan demikian harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat. Negara dan pemerintah adalah Al-Suq al 'Azam/ great market dan itulah inti dari budaya manusia. (Ibnu Khaldun, 102-103 1958) Graudy menyatakan zakat bukanlah suatu karitas (kebaikan hati dari pihak pemberi) tetapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya. (Graudy, H.M. Rasyidi, 337, 1986) Kuntowojoyo menyatakan zakat alat pemerataan mencegah tertumpuknya modal sehingga tak akan lahir monopoli dan monopsomi. (Kuntowijoyo, 167, 1992)

Sabiq menyatakan zakat rukun Islam yang diperintahkan kepada manusia untuk melaksanakannya. Perintah tersebut disampaikan berulang kali hal itu untuk menunjukkan betapa pentingnya perintah tersebut sebagaimana tertera pada 82 ayat al Qur'an bersama-sama perintah shalat. (Sayid Sabiq, 286, 1974) Perintah zakat turun di Mekah belum terperinci baru di Madinah tahun 2 H (624 M) zakat diwajibkan dalam perintah yang terperinci. Suatu contoh kasus menarik dapat diamati dari kisah Sya'labah yang tidak hadir ke mesjid.

Sya'labah ketika ditanya Rasul menerangkan seekor ternak itu telah memperbaiki tingkat ekonomi sya'labah dan dapat kembali ber partisipasi aktif ke masjid. Kasus ini menunjuk zakat diaplikasikan untuk membangun social welfare agar setiap orang dapat berpartisipasi langsung mengikuti pendidikan, pengajaran yang berlangsung di mesjid. Kasus Sya'labah dengan solusi zakat hanya satu contoh dari sekian banyak kasus yang sama pada masa Rasulullah dan diselesaikan dengan penyaluran zakat. Kasus Sya'labah juga berdimensi lain yaitu ketika Sya'labah telah mekmur, sangat banyak ternaknya malahan tidak datang ke mesjid, mungkin menjadi materialistik, Rasul pun memberi teguran pula kepadanya.

Khalifah Abu Bakar Sidik menindak tegas orang yang engkar terzakat mereka diperangi sampai bertobat. Mekanisme zakat pada masa berikutnya dikelola dengan baik. Hampir seluruh pemerintahan Islam mengelola pendapatan negara dari zakat, pajak, dan bea barang

untuk kepentingan sosial dan pendidikan.¹ Pada masa kemunduranpun hal itu dilaksanakan seperti misalnya pemerintahan Idzaj (masa keruntuhan Abbasiyah) mengalokasikan pendapatannya 1/3 untuk pendidikan dan pengajaran. Pada abad VII/XIII dan IX/XV di Afrika Utara (Kamla dan Palestina) guru mengajar alfiyah 1000 kata, tiap kata dibayar ½ dirham tetapi ada informasi bahwa ilmunan/guru (seperti Ibnu Naku) tidak mau menerima pembayaran tinggi jika ia masih menerima zakat. Zakat diwajibkan bagi Muslim dan pajak bagi non muslim dengan prosentasi yang sama untuk bea cukai antara 5-10% diterapkan pada masa Abbasiyah. (Habib, 97, Hasyim, 242, Azra, 234)²

Hal ini menunjukkan ilmuwan atau para pendidik di mesjid, mesjid Khan atau madrasah tidak mengutip bayaran atau gratis jika lembaga itu dibiayai dengan zakat oleh perorangan, khalifah, Amir atau gubernur.

Pada saat pemerintahan dinasti Abassiyah akhir abad XI mulai melemah disusul ditaklukkannya Baghdad 1258 oleh Jengis Khan, koordinasi anggaran dan pengelolaan zakat menjadi tidak menentu. Keadaan ini diiringi dengan jatuhnya ekonomi masyarakat dan lumpuhnya sektor perdagangan, pertanian dan industri. Kondisi kacau ini berlarut sampai abad pertengahan antara tahun 1250-1500. Makin diperburuk dengan hebatnya pertentangan Syiah - Sunni dan hegemoni

¹ Zakat diwajibkan bagi Muslim dan pajak bagi non muslim dengan prosentasi yang sama untuk bea cukai antara 5-10% diterapkan pada masa Abbasiyah. Habib, *op-cit*, p. 97, Hasyim, *op-cit*, p. 242, Azra, *op-cit*, p. 234.

² Makdisi, *op-cit*, p. 161.

Persia atas Arab. Terbelahnya dunia Islam menjadi Arabia (Arab - Irak - Siria - Pelastina); Mesir (Mesir dan Afrika Utara); Persia (150 274 277, Balkan, Asia Kecil dan Asia Tengah) munculnya pengaruh negatif tarekat dan ditutupnya pintu ijtihad serta jatuhnya Spanyol³ administrasi negara praktis tidak berjalan dengan baik, zakat, pajak dan sebagainya tidak terurus dengan sendirinya perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan tidak ada sama sekali kecuali yang dikelola ulama secara individual sebagai tanggung jawab moral. Meski pada tahun 1500-1800 terdapat tiga pemerintahan Islam yang mengalami kemajuan besar yaitu Turki Usmani, Moghul (India) Safawi (Persia). Sungguhpun koordinasi zakat dan pajak berjalan lancar di ketiga kerajaan itu, namun perhatian mereka terhadap pendidikan sangat kurang Harun Nasution, 13,⁴ perhatian tersita pada keadaan tidak stabil dan pengerahan kekuatan menghadapi Eropa yang berambisi menguasai seluruh daerah Islam. Priode 1800 seterusnya priode modern dipandang sebagai priode kebangkitan umat Islam. Karena menyadari kelemahan dan ketertinggalan dari Barat yang tampil dengan peradaban baru yang lebih tinggi.⁵ Upaya mengejar keterbelakangan terus dilakukan namun pendidikan sebagai instrument yang sangat perkasa untuk membentuk pemikiran dalam situasi kondisi ini ditinggalkan.⁶ Sampai saat ini pengorganisasian zakat masih berorientasi konsumtif dan personal belum produktif dan sistemik.

³ Harun Nasution, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, *op-cit*, p. 13

⁴ *Ibid*, p. 14.

⁵ *Ibid*

⁶ Rahman, *op-cit*, p. 168.

b. Infaq, sedeqah dan wakaf bagi pendanaan pendidikan

Infaq dan sedeqah adalah dana yang diberikan secara skarela sebagai rasa solidaritas sosial untuk mendapatkan kepuasan batin dan mengharap ridha Allah memenuhi anjurannya. Infaq dapat berwujud partisipasi masyarakat perorangan pada kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh siapa saja miskin ataupun kaya. Sehingga tanggung jawab dan kesempatan berpartisipasi tidak hanya pada orang kaya saja atau pemerintah saja berdasarkan kemajuan masing-masing. Adanya anjuran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif pada kegiatan sosial dan membangun etos kerja yang tinggi. Sejak masa Rasul infaq dan sedeqah dari masyarakat menjadi tulang punggung pendanaan sarana ibadah dan sosial lainnya.

Rasul acapkali mengajak langsung masyarakat berinfaq sedeqah untuk kepentingan sosial tercatat Rasul mengumpulkan infaq sedeqah masyarakat untuk membeli sebidang tanah untuk lokasi mesjid di luar kota Madinah.⁷ Kondisi ini berakar pada motivasi yang kuat untuk berinfaq⁸ motivasi tidak saja bernilai spiritual tetapi juga bernilai sosial ekonomi. Al-Qur'an

⁷ Tanah yang dibeli Rasul dengan dana infaq itu seluas 25.75 x 27.33 m pembangunan mesjid Quba' itu juga dilakukan dengan gotong royong. Pembangunan ini dipandang sebagai permulaan bentuk wakaf dalam Islam setelah pembangunan Mesjid Nabi di pusat kota Madinah, Lihat Monzer Kahf, "Waqaf", in J.L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol. IV, (New York: Oxford University Press, 1995), p. 313.

⁸ Q.S. Ali Imran, ayat 92, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, hanyalah jika kamu menafkahkan sebahagian dari harga kamu kasihi. Apa yang kamu nafkahkan itu sesungguhnya Tuhan mengetahuinya".

mengisyaratkan infaq iquivalen dengan jihad fi sabilillah,⁹ sama dengan menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan tiap tangkai 700 butir dengan demikian nilai tambah investasinya 700 kali ganda.¹⁰

Selain infaq dianjurkan pula sedeqah jariah yaitu memberikan infaq untuk kepentingan sosial pada sekolah, madrasah, mesjid atau bangunan sosial lainnya yang selama masih dipergunakan pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Sedeqah jariah ini dapat berbentuk uang ataupun benda. Ketika Umar bin Khattab disertai tanah yang subur di lembah Khaibar, Umar bertanya pada Rasul sebaiknya bagaimana penggunaan tanah seluas itu Rasul menyatakan tahan dan berikanlah hasilnya. Umar melaksanakan hal itu inilah awal yang penting dari lahirnya suatu sistem pendanaan kepentingan sosial dalam Islam pada masa-masa berikutnya. Cara ini banyak dilakukan sahabat dan kalangan hartawan Islam sehingga kepentingan umum, pendidikan atau lainnya memiliki sumber dana tetap. Sampai pada sekitar 218 M Al-Makmun menamakan cara ini dengan istilah wakaf. Ia menyediakan harta benda yang dapat melimpahkan hasil untuk pembiayaan lembaga-lembaga ilmiah dan kebudayaan.¹¹ Ini dicetuskan ketika ia mengelola Baitul

⁹ Q.S. Al Shaf, ayat, 10-11.

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah, ayat 261.

¹¹ Lihat Ahmad Syalabi, *op-cit*, p. 374, Lihat juga Sayyed Amer Ali, *A short History of The Saracens*, New Delhi: Kitab Bahaavan, 1976), p. 274.

Hikmah¹². Gagasan ini berangkat dari rasa kekhawatiran Baitul Hikmah nanti mati atau tak berkembang karena tergantung pada kedermawanan para khalifah dan Amir-amir yang mungkin saja tidak selalu sama. Obsesi Makmun semua lembaga pengkajian dan pengembangan budaya serta ilmu pengetahuan tegak kuat dapat berlangsung terus menerus membelanjai dirinya sendiri.¹³

Sebenarnya praktek wakaf tunai sudah mulai sejak abad kedua Hijriyah, hal ini didasarkan adanya motivasi dari fatwa yang disampaikan para sahabat dan para ulama. Misalnya Imam Al-Zuhri (ulama tadwin al Hadist) wafat tahun 124 H menfatwakan kebolehan dan penganjuran terhadap wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Caranya dengan menjadikan uang tersebut modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf tentunya dengan memperhatikan faktor resiko seperti kerugian yang dapat mengancam kesinambungan uang wakaf. Ulama lainnya yang membolehkan wakaf tunai antara lain adalah ;Al Anshari dalam kitab Radd al Mukhtar Al-Anshari menjelaskan “ kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan.

¹² Baitul Hikmah sebuah lembaga kepentingan pengkajian budaya dan ilmu pengetahuan yang didirikan masa Harun al Rasyid. Lihat Saad Mursi Ahmad, *Tarikh Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Mesir: Alam al Kutub, 1974), p. 118.

¹³ Obsesi al Makmun sangat beralasan bahwa jika bantuan tertahan atau terhenti maka keberadaan suatu lembaga akan sangat dependent pada kemauan baik pemberi bantuan, atau penguasa. Lagi pula bila keuangan negara merosot atau pejabat kikir atau kurang minat pada kegiatan lembaga itu maka lembaga akan kehilangan aktivitasnya.

Mazhab Hanafi menyatakan mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan setempat Ibnu Taymiah dalam kitab Majmu' al Fatawa jilid 18 juz 31 h.101 menyatakan pendapat dari kalangan Hanabilah membolehkan berwakaf dengan bentuk uang

Model wakaf kemudian menjadi populer diikuti oleh para khalifah penggantinya dan para pembesar. Bahkan bagi keperluan penyelenggaraan pengkajian ilmiah termasuk bagi mereka yang menyertai kegiatan ilmiah di mesjid, kelompok study dan halaqah yang terdapat pada setiap pojok atau lingkaran tiang mesjid disediakan wakaf tersendiri yang cukup memenuhi kebutuhan para petugas dan para guru.¹⁴ Para pembesar pada abad berikutnya seperti berlomba berwakaf. Misalnya Nizam Mulk (462H) mewakafkan pasar sekolah (pusat pembelajaan) beberapa bidang tanah di tempat-tempat tertentu, Syalabi juga menambahkan catatan perjalanan Ibnu Zubeir di Baghdad ada 30 madrasah memiliki gedung yang indah, Madrasah Nizhamiyah yang terbesar hasil wakaf untuk pengelolaannya diterima 1500 dinar setiap tahun dan untuk madrasah Nizhamiyah di Ashfihar 10.000 dinar pertahun.

Nuruddin berwakaf untuk kepentingan madrasah Hanifah Syafiiyah, Hambaliyah, Malikiyah untuk guru, ulama dan fuqaha dan para penuntut ilmu di mesjid Jami'. Diantara harta wakaf itu terdapat dua buah gilingan gandum, empat bidang kebun, sebidang tanah, sebuah tempat mandi (steambath) dua buah toko di Athharim, untuk kepengurusan Nuruddin mengangkat seorang Maghribi dari jamaah mesjid Jami'.

¹⁴ Ahmad Syalabi, *op-cit*, p. 374.

Di Mesir pada masa dinasti Fathimiyah didirikan al Azhar sejak tahun 378 H al-Azhar menerima wakaf dari Azizbillah untuk belanja al Azhar. Jumlah wakaf terus bertambah dengan wakaf dari khalifah-khalifah berikutnya.¹⁵ Bani Ayyub yang menggantikan dinasti Fatimiyah juga mengikuti langkah tersebut. Salahuddin membangun madrasah Nashiriyah di al Qarafah melengkapi dengan wakaf beberapa buah toko yang terletak di belakang madrasah, sebuah steambath terletak di samping areal madrasah dan sebuah pulau disebut Gajah di sungai Nil di luar kota Kairo. Langkah itu diikuti Taqiyuddin Umar Ibnu Ayyub, Syahim Syah Ibnu Ayyub membeli manazilul Izzi yang terletak di tepi sungai Nil (tempat pesiar keluarga khalifah dinasti Fatimiyah) untuk diwakafkan hasilnya bagi keperluan pembelanjaan kegiatan ulama golongan Syafi'iyah. Kemudian ditambah dengan wakaf sebuah steambath dan areal sekitarnya dibangun pula sebuah hotel An Nachlah dan sebuah pulau pesiar yang dikenal dengan Jaziratur Raudhah.

Bentuk wakaf lain adalah Syuja'uddin Ibnu ad Dimagh memberi wakaf kepada madrasah ad Dimaghiyah di Damaskus berupa gedung milik suaminya untuk madrasah golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah. 1/3 saham dari 24 saham perusahaan pertanian Ad Dimaghiyah satu bahagian saham dari Rafinul Hajjat dan sebahagian dari pertanian Haiman Irail yang terletak di luar kota Damaskus.¹⁶

¹⁵ Al Hakim mewakafkan semua gedung Darul Qurn dan semua gedung Darul Charq al Jadibah.

¹⁶ Penjelasan panjang lebar diungkapkan Syalabi dalam bukunya *Tarikh at-Tarbiyah*, op-cit, p. 373-383. Syalabi juga menjelaskan wakaf-

Pada tahun 628 H putri 'Ismatullah Sittury Syam Ummu Hisanuddin Binti Ayyub Ibnu Sya'di (saudara Sulthan Shalahuddin) mewakafkan untuk sekolah Asy-syamiyyah al Jauwaniyah penghasilan beberapa perkebunan untuk pembiayaan gedung, biaya para fuqaha, pelajar-pelajar dan keperluan lainnya.¹⁷

Badr Ibnu Hasanawiyah al Kurdi (w. 105) gubernur beberapa propinsi memberi wakaf dalam jumlah besar kepada ilmuan, jamaah haji, membangun sejumlah mesjid akademi satu elemen baru dalam pendidikan tinggi. Pada masa ini ada 3000 mesjid akademi yang memiliki asrama (mesjid-Khan).¹⁸

Madrasah-madrasah di Harmayn menjadi madrasah Kosmopolitanisme. Disana berkumpul ulama dan juga mahasiswa dari berbagai daerah

wakaf yang diberikan untuk pengkajian yang dilangsungkan di pojok-pojok mesjid seperti :

- Pojok Imam Syafi'i, diberikan al Malikul Aziz Usman Ibnu Salahuddin.
- Pojok al Kamaliyah dibeanda yang berdekatan dengan pintu mesjid yang dapat dimasuki dari pasar Gazal yang diurus oleh Kamluddin As Sammudy diberi wakaf sebuah hotel di Kairo.
- Pojok al-Tarjizah terletak di depan mihrab kayu dipimpin oleh Tajuddin as-Sathty diwakaf untuk kegiatannya beberapa buah gedung di Kairo.

¹⁷ Pada piagam wakaf -- yang peninggalannya masih ada walau gedung sekolahnya telah runtuh dan telah berganti dengan perumahan -- tertulis perkebunan yang diwakafkan yaitu seluruh hasil perkebunan di desa Bazirah, semua hasil perkebunan "Jirmana" 11 ½ % dari 24 % dari perkebunan "at Rianah" 21% dari 24% hasil dan 50% hasil dari desa Majid al-Suwida dan 100% hasil dari desa Majidal al-Qaryah.

¹⁸ Lihat Goerge Makdisi "On The Origin and Development of the College in Islam and the West" dalam Khalil E. Semaan (ed.3), *Islam in Medieval West*, (Albany: Suny Press, 1980), p. 32-33.

muslim. Madrasah-madrasah itu menerima wakaf dari berbagai penguasa muslim dari berbagai penjuru dunia muslim mulai dari Ghazi Turki sampai Syiah Muslim India.¹⁹ Bantuan itu selain ikatan moral keagamaan juga bermuatan kebijakan bersifat politis dengan itu mereka akan mendapat dukungan sungguh-sungguh dari rakyat muslim. Motif yang sama juga pada Sultan Selim I dinasti Turki Usmani. Sultan bukan saja secara moral merasa berkewajiban melindungi Haramayn akan tetapi juga sebagai klaim politik bahwa dia adalah pemimpin dunia Islam sekaligus sebagai upaya mempersatukan dunia Islam tunduk atau minimal mengakui kedaulatannya sebagai khalifah dunia Islam. Ada tiga jenis bantuan dinasti Usmani kepada Haramayn; (a) bantuan uang tunai (surre) setiap tahun, (b) bantuan pangan, (c) mendirikan badan wakaf di Mesir untuk kepentingan tanah suci.

Dana wakaf juga disediakan raja-raja Islam Nusantara seperti Mataram untuk Kyai Sepuh, Kyai Anom, Penghulu Naib dan pegawai-pegawainya dan Modin.²⁰ Di Kartasura Sulthan memberikan tanah kepada kyai serta keluarga dan santri, tanah menjadi hak milik kyai turun temurun daerah itu disebut Perdikan tanah gubernemen dan sebahagian diberikan kepada kalangan bangsawan.

Di Indonesia kyai-kyai juga banyak menerima wakaf yang diurusinya secara turun temurun. Dewasa

ini yayasan-yayasan bertindak sebagai badan wakaf seperti badan wakaf UII.²¹

Pengelola wakaf dapat menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan hasilnya bagi lembaga yang didukungnya. Seorang yang berwakaf menyusun dokumen hukum yang secara formal dicatat seorang notaris. Dokumen itu memuat materi kekayaan yang diwakafkan dan mencantumkan pula cara penggunaan uang dari investasi, penyewaan, atau penjualan asset tersebut disamping pemberi wakaf juga menentukan satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf itu yang dalam kenyataannya tulis stanton, seringkali adalah yang memberi wakaf tersebut atau ahli warisnya.²² Jika yang didukung itu lembaga pendidikan pemberi wakaf dapat menentukan kriteria tenaga pengajar yang harus diikuti. Kontrol atas wakaf oleh yang berwakaf ini pulalah agaknya yang menjadi dasar para kyai mengurus dan mengawasi langsung harga wakaf yang diberikannya. Infaq sadaqah jariah yang tidak dihabiskan tetapi menjadi modal tetap atau dana abadi adalah sama dengan wakaf. Di Indonesia wakaf sudah mentradisi dalam bentuk wakaf tanah atau benda yang bersifat tetap Istilah wakaf tunai dalam bentuk uang dikalangan ummat islam di tanah air masih merupakan hal baru dan masih ikhtilaf

B. Mengembangkan Sistem Endowment Financial Pendidikan

Tampaknya sulthan langkat dalam mendirikan Jam'iyah Mahmudiyah memiliki pandangan yang sama dengan

¹⁹ Ahmad Syalabi, *op-cit*, p. 374.

²⁰ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), p. 225.

²¹ Lihat Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga UII pasal 1 dan 8.

²² Stanton, *op-cit*, p. 35.

Nizhamul Muluk yang menginginkan lembaga pendidikan Islam harus dapat hidup berkembang tanpa tergantung kepada penguasa. Gagasan ini memiliki unsur-unsur penting dari pengembangan sistem manajemen yang saat ini disebut dengan manajemen lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Ada suatu kesadaran bahwa penguasa dapat saja memberikan bantuan dalam bentuk wakaf, zakat, infaq. Sederajat untuk mendukung kemajuan pendidikan. Namun yang terpenting adalah menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat seluruhnya. Berdasarkan data yang ada Kerajaan Langkat di Sumatera Timur telah mewakafkan tanah dan gedung untuk penyelenggaraan pendidikan dibawah pengelolaan Jam'iyah Mahmudiyah. Selain itu juga pihak kesultanan menyediakan dana untuk madrasah Jam'iyah Mahmudiyah, Maslurah, Li Banat Aziziyah dan beasiswa keluar negeri (ke Mekah) dari hasil wakaf dari beberapa puluh toko, sarana angkutan air, kebun-kebun serta rumah-rumah tempat tinggal.

Tampaknya wakaf tersebut dimaksudkan sebagai modal dasar dan jaminan untuk kelancaran operasional penyelenggaraan Jam'iyah Mahmudiyah. Berdasarkan catatan yang ada wakaf dari Sulthan untuk kepentingan penyelenggaraan Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah antara lain adalah :

Wakaf tanah 4,3 Ha

Wakaf gedung Madrasah Maslurah beserta tanahnya yang merupakan bekas istana lama sulthan.

Wakaf toko dan penghasilan sewanya yang terdiri dari:

- 14 toko yang terletak di kota Tanjung Pura dengan grantnya masing-masing No. 67, 80, 84, 184, 186, 188, 190, 217, 210, 229, 285, 287, 315, dan 317.

- Toko yang terletak di kota Stabat dengan grant No. 109, dan 111
- Toko yang terletak di Kota Binjai dengan grant No. 156, dan 77.

wakaf Kebun Karet dan Hasilnya terletak di Kampung Batang Durian Tanjung Pura seluas 15 Ha

Serta yang terletak di Kampung Pematang Serai seluas 3 Ha.

Sangat disayangkan saat ini inventarisasi harta wakaf tersebut tidak jelas. Menurut keterangan yayasan yang jelas ada hanya Akta Hak Milik Jam'iyah Mahmudiyah adalah tanah seluas 4,3 Ha. Tempat lokasi Jam'iyah dan Kampus STAIJM sekarang ini (Fachruddin, RY, 25,07,2012) Banyak hal yang menyebabkan status wakaf produktif ini menjadi tidak jelas diantara sebab utama adalah karena masa revolusi perjuangan kemerdekaan yang banyak mengambil korban. Sehingga banyak pula dokumen yang hilang dan harta wakaf itu musnah. Tetapi yang sangat disayangkan terdapat data yang menjelaskan bahwa harta wakaf tersebut justru dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga tanpa peduli bahwa harta wakaf dalam Islam tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diperjual belikan.

Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pada Madrasah Jam'iyah Mahmudiyah selain dari zakat dan wakaf adapula bantuan rutin sulthan. Peran serta atau partisipasi masyarakat juga digerakkan secara optimal terutama dalam mengumpulkan dana pembangunan gedung baru seperti pembangunan gedung Madrasah yang diberi nama Mahmudiyah tahun 1914 selesai tahun 1917 untuk

pembangunan gedung ini tercatat dana sumbangan dari dermawan berjumlah f. 22.000 gulden dan sisanya dari total biaya sampai selesai f. 43.903,40,- gulden diperoleh dari sumbangan sulthan Pembangunan gedung Aziziyah 1922 dilakukan dengan bentuk partisipasi masyarakat dan kesulthanan juga

Suatu hal yang ingin dikemukakan disini adalah adanya suatu wawasan baru yang dikembangkan saat itu yaitu *pertama* gagasan untuk pendanaan pendidikan dalam bentuk *endowment financial* yang diperoleh dari wakaf produktif seperti hasil kebun dan hasil sewa toko. *Kedua*, Gagasan untuk mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan yang otonom dan menggerakkan partisipasi masyarakat (*community school based manajement*) menjadikan lembaga pendidikan Jam'iyah Mahmudiyah menjadi tidak terpisah dari kehidupan sosial dan kultural. *Kedua* gagasan ini sangat strategis dan berjangkauan jauh kedepan dan setidaknya sangat maju sesuai kontek zaman itu.

Bukti sejarah tentang wakaf wakaf sulthan Abdul Aziz ini menunjukkan keagungan sifatnya dan kemuliaan akhlaknya dan kedalaman pemahaman agama yang dimilikinya. Tindakan amal wakaf ini menjadi monumen kejayaan dan jasa serta kebanggaan Kerajaan sepanjang masa. Menjadi tugas suci untuk melakukan upaya pengembalian wakaf wakaf sulthan yang hilang dan telah diperjual belikan oknum tak bertanggung jawab.

Dewasa ini MUI memperkenalkan definisi wakaf yaitu: menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan, untuk disalurkan (hasilnya)

pada suatu yang mubah yang ada. MUI memfatwakan tentang wakaf uang dengan beberapa pertimbangan:

1. wakaf uang (cash wakaf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang. Kelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. termasuk surat surat berharga
3. wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Namun demikian wakaf tidak boleh dialihkan atau dibatalkan. Jika terjadi permasalahan diserahkan ke pengadilan pemerintah di Indonesia untuk pengelolaan wakaf diatur dengan UU wakaf nomor 41 tahun 2004 dan untuk petunjuk pelaksanaannya dijabarkan pada PP no. 42 tahun 2006.

Dilihat secara historis para penguasa dalam pemerintahan Islam sangat mendorong pengembangan wakaf sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pengembangan pendidikan dan pembangunan. Pembiayaan pendidikan menjadi sangat diutamakan berkaitan dengan kepentingan siswa atau penuntut ilmu yang sangat memerlukan pembiayaan yang cukup sehingga dapat mengembangkan potensi secara optimal, berkaitan dengan penyelenggara seperti untuk penyelenggaraan program pembelajaran, sarana prasarana dan sarana fasilitas termasuk pusat sumber belajar, untuk tenaga pendidik dan kependidikan dan lainnya untuk dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari zakat

infaq sadaqah dan wakaf. Cara ini tetap abadi karena tetap dilanjutkan oleh Negara Negara Islam saat ini seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Malaysia dan Yordania, melalui lembaga-lembaga wakafnya Wakaf bagi Negara ini belajar dari praktek sahabat dan umat Islam terdahulu wakaf tidak hanya untuk biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat, melainkan juga dapat membangkitkan perekonomian. Karena menurut pandangan mereka wakaf dapat dikelola dalam bentuk saham. Usaha usaha produktif, seperti real estate, pertanian dan lainnya yang dikelola oleh lembaga lembaga ekonomi yang profesional. Wakaf selain harus dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional tetapi juga perlu bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah. (Didin, 2004). Seperti di Mesir badan wakaf yang dikelola di Mesir menitipkan harta wakaf di Bank Islam, bekerjasama dengan beberapa perusahaan membeli saham dan obligasi, perusahaan penting, disamping juga memanfaatkan lahan kosong agar produktif. Hasil pengembangan wakaf dimanfaatkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah anak yatim, anak terlantar, mengangkat kehidupan pedagang kecil dan kaum dhuafa serta membantu beasiswa. Dana hasil pengembangan wakaf dipergunakan juga untuk mendirikan mesjid, sekolah, dan penelitian serta kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi lainnya. Hal serupa juga dilakukan di Bangladesh, disini wakaf dikelola lembaga keuangan syariah yakni melalui Social Investment Bank Ltd (SIBL) dengan mengembangkan pasar modal Sosial (The voluntary Capital Market) serta mengembangkan instrumen keuangan lainnya seperti Waqaf Properties Development Bond, Cash Waqaf Deposit Certificate, Family Waqaf Certificate, Mosque Community Share, Quard-e Hasana Certificate, Hajj Saving Certificate dan lain lain. Di beberapa negara kapitalis wakaf

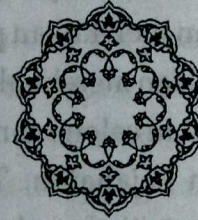
Prof. Dr. Fachruddin, MA

warga muslim pun dikelola secara profesional oleh lembaga lembaga keuangan seperti Kuwait Waqaf Public Foundation (KAFT) yang bermarkas di New York dan Al-Manzil Islamic Financial Service yang bertindak sebagai advisor. Hasilnya KAFT berhasil membangun apartemen senilai 85 juta dolar diatas tanah milik Islamic Cultural Centre New York. Tentu kemungkinan yang sama dapat dilakukan di Indonesia terutama dengan makin semaraknya eksistensi lembaga keuangan syariah dan dengan adanya payung hukum UU wakaf no 41 tahun 2004 serta PP 42 tahun 2006.

Dengan pengelolaan dana zakat infaq, sadaqah dan wakaf secara profesional atas dasar prinsip prinsip syariah baik dalam bentuk waqaf tunai, waqaf produktif serta berbagai instrumen keuangan lainnya akan menjadi kekuatan ekonomi umat dan sumber dana peningkatan kualitas pendidikan Islam.

Agaknya sudah waktunya pengurus Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah Tanjung Pura Langkat tampil melakukan upaya upaya kemitraannya dengan pemerintah baik dalam upaya regulatif maupun dorongan dorongan lainnya yang dapat mempercepat terwujudnya sistem aplikasi lembaga zakat dan wakaf, serta pengembangan dan peningkatan manajemen lembaga amal zakat infaq sadaqah dan manajemen kenazhiran waqaf yang dikelola pemerintah maupun organisasi Jam'iyah Mahmudiyah. Pemahaman dan kemauan serta komitmen para pimpinan Jam'iyah dan masyarakat Islam untuk mem-berdayakan zakat, infaq sadaqah dan waqaf termasuk wakaf tunai sebagai sumber utama pendidikan Islam menjadi kunci sukses penting untuk membantu bangsa ini keluar dari krisis dan mempercepat menjadi bangsa yang sejahtera berkualitas.

Prof. Dr. Fachruddin, MA.



BAB VI REFLEKSI DAN IMPLIKASI

A. Refleksi

Berbagai kebijakan Pembaharuan pendidikan yang telah berlangsung dari akhir abad XIX di Sumatera Timur Langkat Tanjung Pura Tepatnya mulai tahun 1898 dengan munculnya gagasan untuk mengadakan pendidikan untuk kaum perempuan serta bermuara pada berdirinya Madrasah Maslurah atau Madrasah lil Banat dengan mengambil tempat di Istana Lama Sultan Langkat merupakan gagasan pembaharuan pendidikan yang pertama di Nusantara. Gagasan ini muncul jauh sebelum penggunaan kata madrasah dipakai untuk lembaga pendidikan agama di Nusantara dan lembaga pendidikan untuk puteri dan pengajaran untuk perempuan adalah gagasan penting yang lahir jauh sebelum Kartini mendirikan sekolah perempuan di Jawa serta tokoh perempuan lainnya menyuarakan perlunya pendidikan untuk wanita. Masyarakat langkat pantas berbangga atas betapa majunya pemikiran pendidikan dan betapa aktual untuk tidak dikatakan betapa modernnya kebijakan pendidikan Islam yang telah berlangsung di Langkat. Setting sosial gagasan

itu tercatat berangkat dari analisis dan pemikiran Sultan dan Isterinya Tengku Puan Maslurah bahwa pemberantasan kejahatan dan penumbasan perampok serta berbagai bentuk kejahatan yang meraja lela pada saat itu telah menelan biaya dan tenaga bahkan jiwa yang banyak. Jalan yang paling baik adalah dengan melakukan pendidikan bagi kaum perempuan dengan demikian mereka akan dapat memberikan wawasan kepada suami atau calon suami serta generasi muda untuk tidak melakukan kejahatan. Ternyata gagasan ini membuahkan hasil yang positif Langkat lahir menjadi daerah yang aman tenteram dan masyarakatnya taat beragama dan kemudian menjadi pusat pendidikan agama di kawasan ini.

Tentu kebanggaan itu tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah saja, ia harus tumbuh berkembang menjadi kajian mendalam faktor apa saja yang telah membentuk pemikiran itu dan bagaimana mengkristal sebagai suatu kebijakan dan pertanyaan berikutnya mengapa justru kemudian Langkat tidak menjadi pusat emansipasi wanita dan kemudian mengapa bentuk pendidikan itu justru tidak berkembang atau dikembangkan lagi dewasa ini ketika setting sosialnya hampir mendekati dengan waktu ketika gagasan itu tercetuskan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi centrum kajian Jamiyah Mahmudiyah untuk mampu mengepakkan sayapnya dan mengambil peran didepan pada masa kini dan akan datang.

Adanya pendirian organisasi sosial pendidikan dengan nama Jamiyah Mahmudiyah tentu gagasan penting menjadi momentum kedua dalam manajemen organisasi pendidikan di Nusantara setelah momentum pertama keberadaan Bayangkare Ishlah yang didirikan oleh Raden Fatah dengan maksud yang sama. Dengan dibekali waqaf dan aset wakaf

produktif organisasi ini berhasil menghantarkan Langkat menjadi pusat pendidikan yang paling berpengaruh dan modern di kawasan Asia Tenggara serta kota Tanjung Pura muncul sebagai kota pelajar dengan asrama pelajar yang paling lengkap dan mewah menurut masanya. Para siswa yang diasramakan datang dari berbagai daerah kawasan ini dengan biaya gratis sepenuhnya operasional didanai dengan hasil wakaf produktif. Sungguh prestasi dan kebijaksanaan pembaharuan yang sangat monumental. Saat ini Organisasi sosial Pendidikan Jamiyah Mahmudiyah telah memasuki era melinium kedua dalam usia 105 tahun namun fakta menunjukkan organisasi ini tidak menunjukkan kifrah sebagai gerakan modernitas bahkan tidak menunjukan perkembangan yang berarti bila dibanding dengan organisasi lainnya yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan yang lebih belakangan berdiri. Organisasi ini tidak berkembang ke daerah lain apalagi ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada cabang ataupun lembaga pendidikan Jamiyah Mahmudiyah yang didirikan di daerah lain selain kota Tanjung Pura dewasa ini. Sungguh mengherankan dalam pengaruhnya yang demikian luas serta alumninya yang banyak dan beberapa tumbuh menjadi tokoh sumpah pemuda dan tokoh pergerakan kebangsaan serta tokoh nasional justru organisasi ini seperti kehilangan modernitas dan bahkan menjadi barang antik saksi bisu kemegahan dan kemajuan yang pernah ada. Madrasah yang masih terus ada sampai saat ini adalah madrasah tsanawiyah, Aliyah dan diniah. Berjalan sebagaimana madrasah swasta lainnya, tidak terlihat kelebihan dan keunggulannya meski memiliki kekayaan sejarah yang sangat hebat. Elan vital semangat dan budaya pembaharuan yang menjadi ruh Jam'iyah Mahmudiyah tidak ditumbuh kembangkan. Mengapa hal ini selama ini dapat

terjadi begitu telakkah hantaman dan beban yang diakibatkan revolusi sosial yang meluluh lantakkan kesulthanan Langkat sehingga Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah menjadi kehilangan keberdayaan dan kultur pembaharuannya dan kepeloporannya. Mengapakah semangat dan wawasan yang menjadi etos kemajuan Jam'iyah tidak dijumpai lagi? Mengapa keengganan dan ketidakpedulian dari keluarga besar Jamiyah Mahmudiyah lebih subur ketimbangan upaya memajukannya. Beberapa tokoh yang gigih berjuang dan berupaya bangkit telah berbuat menunjukkan eksistensi Jam'iyah Mahmudiyah seperti gagasan membuka perguruan tinggi Agama Islam. Dewasa ini STAI Jam'iyah menunjuk kan kemajuan terutama lima tahunan terakhir. Dengan warisan sejarahnya seyogianyalah Sekolah Tinggi ini meningkat status menjadi Institut dan sebagai Universitas di Kabupaten Langkat. Sejak ulang tahun ke 100 yang lalu program menjadi Institut dan selanjut menjadi universitas sudah dicanangkan. Namun upaya yang serius sangat diperlukan. Budaya untuk menghormati dan menghargai karya setiap aktivis Jam'iyah Mahmudiyah perlu dihidupkan. Semua pihak haruslah secara ikhlas dan bersungguh sungguh saling bahu membahu memajukan setiap unit institusi pendidikan yang ada. Fungsionalisasi, konsolidasi, organisasi dan akuntabilitas serta transparansi manajemen menjadi kunci sukses Jam'iyah Mahmudiyah meretas keadaan.

Keluarga besar Jam'iyah Mahmudiyah harus keluar dari mental blocking yang selama ini dideritanya. Upaya untuk memberdayakan budaya kepeloporan, budaya pembaharuan yang menjadi kekuatan inti Jam iyah Mahmudiah sejak dilahirkan harus menjadi prioritas.

Jika pada waktu lalu Madrasah Jamiyah Mahmudiah menjadi pelopor pembaharuan kurikulum. Dengan model pembelajarannya telah lahir alumni yang memiliki integritas

ke Islaman. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa sekarang hal yang sama tidak dilakukan, mengapa organisasi alumni yang sudah terbentuk tidak tampak kifrahnya? Mengapa rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk memajukan alamamaternya tidak pernah tumbuh, mengapa tidak lahir semangat untuk mengembang dan membesar Jamiah Mahmudiah lainnya organisasi besar lainnya. Dengan warisan sejarah serta kultur yang dimilikinya mampukah Jamiah Mahmudiah menjadi pusat pembinaan dan pendidikan pengajaran Islam yang terdepan dan terbaik.

Akankah kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membangkitkan keberdayaan masa lalu. Semua pertanyaan ini akan menjadi simpul simpul pengkajian dan starting point untuk memajukan Jamiyah Mahmudiah ke masa depan.

B. Implikasi

Dengan dipetakan kebijakan Pem baharuan Pendidikan yang pernah dilakukan Jamiyah Mahmudiyah menjadi suatu buku tentunya memberi implikasi bagi :

Terbukanya pengkajian ilmiah yang lebih serius tentang konstelasi Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia dan munculnya tesis penting sebagai anti tesis yang mengemukakan Pembaharuan pendidikan Islam justru berawal dari Sumatera Barat.

Kajian tentang Jam'iah Mahmudiah Li Thalabil Khairiyah dalam prespektif sejarah sosial akan melahirkan temuan baru yang lebih memposisikan hal hal strategis dalam modernitas Pendidikan Islam di Nusantara.

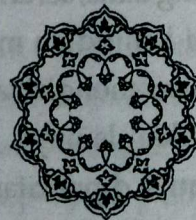
Pengurus Besar dan pengurus yayasan yayasan Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil khairiyah akan semakin

memahami jati diri dan potensi yang dimiliki dan menggugah eksponen yang ada untuk bersemangat mengembangkan kifrah organisasi pendidikan yang tertua ini serta memberi kesadaran baru tentang peran dan fungsi sosial dan budaya Jam'iyah Mahmudiah Li thalabil khairiyah.

Memungkinkan Jam'iyah Mahmudiyah menyusun renstra untuk tugas pemberdayaan peradaban dengan menjadikan kajian pembaharuan sebagai kerangka kerja ke depan.

Terbuka pandangan untuk memberdayakan fungsi organisasi Jam'iyah Mahmudiah sebagai lembaga wakaf dan mengadakan reinventarisasi asset serta memberi kesadaran semua pihak untuk mengemban misi suci mengembalikan dan memaksimalkan fungsi wakaf yang pernah ada termasuk yang sampai saat ini masih diduduki masyarakat sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana gedung madrasah dan lainnya.

Buku ini bersama buku buku yang telah diterbitkan lainnya dapat menjadi referensi bagi materi ajar program pendidikan Ke-Jam'iyah Mahmudiyah-an baik sebagai mata pelajaran di Madrasah maupun bidang study pada setiap program studi di Sekolah Tinggi sebagaimana direncanakan Pengurus Besar Jam'iyah Mahmudiyah akan dimulai pada tahun ajaran 2017/2018 ini



BAB VII PENUTUP

A. Optimalisasi Organisasi Pendidikan Islam Jam'iyah Mahmudiyah Membangun Sumber Daya Manusia

Organisasi Pendidikan Islam secara historis dalam dunia pendidikan Islam telah muncul dalam level institusi seperti Daar, Kutab/Maktab, Mesjid, dan Majlis Ilmu, Maktabah, Madrasah dan Jami'ah (Pendidikan Tinggi). Untuk level administrasi manajemen yang mengurus institusi ini sejak awal baik secara langsung maupun tidak langsung di koordinasi oleh suatu badan wakaf. Institusi yang langsung dibawah Badan Wakaf yang tersendiri mulai dibudayakan sejak pemerintahan Nizamul Mulk yang menggagas mendirikan organisasi pendidikan yang bernama Nizamiyah yang mengelola seluruh administrasi manajemen wakaf untuk penyelenggaraan pendidikan. Nizamiyah kemudian mengelola pendidikan dalam bentuk Madrasah yang dikenal dengan Madrasah Nizhamiyah. Ada 13 daerah yang dibangun Madrasah Nizhamiyah. Selain madrasah dirikan juga Ribath (sekolah Sufi), Bimaristan (Sekolah Tinggi

Kedokteran) dan Observatorium (Sekolah Tinggi Astronomi). Gagasan untuk mendirikan organisasi pendidikan ini menurut Nizamul Mulk adalah menghilangkan patronase penguasa, serta adanya jaminan kebersinambungan dan keberlanjutan sistem pendidikan dan penyandang dana, serta membuka keikutsertaan masyarakat. Langkah ini kemudian menjadi model di dunia Islam termasuk juga dalam mendirikan Al-Azhar, dan juga lembaga lembaga pendidikan lainnya. Dalam perkembangan kemudian badan wakaf hanya diprioritaskan untuk penyediaan dan penyandang dana penyelenggaraan lembaga pendidikan, sedangkan urusan tata kelolanya di urus oleh suatu badan kenazhiran yang dibentuk oleh suatu perkumpulan atau jamaah. Justru itu nama yang dikenal kemudian dengan Syarikat, Jamaiah atau Ittihad. Syarikat ini kemudian yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan secara optimal. Di Indonesia munculnya tradisi bersyarikat ini berawal dari gagasan para wali untuk mendirikan persyarikatan penyebaran Islam di pulau Jawa dengan nama Bayangkari Ishlah, Selanjutnya organisasi ini menyelenggarakan pendidikan agama dalam bentuk diasramakan (pesanterian yang kemudian disebut menjadi pesanteren) Perkumpulan ini mendirikan Pesanteren Gelagah Arum pada tahun 1476.

Hampir seluruh institusi pendidikan yang ada pada awalnya, tidak menggunakan kata organisasi tetapi menggunakan kata syarikat atau jamaiah ataupun ittihad dan Persatuan. Kata ini mengandung arti persukutuan, kerjasama atas dasar musawarah mufakat dan mewujudkan cita-cita bersama yang terpadu erat secara istiqamah berjuang untuk mewujudkan tujuan itu menjadi kenyataan. Sedangkan kata Jamaiah yang berarti perhimpunan orang banyak yang menyatukan semangat, cita-cita untuk membangun sistem sosial yang berkehidupan yang hasanah dan diridhai Allah

SWT. Demikian juga kata Ittihad mengandung maksud yang sama dengan Persatuan. Penggunaan kata itu menurut Steenbrink tersembunyi keinginan terhadap apa yang disebut D. Bakker " Suatu ummat Islam Indonesia yang berkeyakinan yang kompak dan dipersatukan" (Steenbrink, 1986, 154)

Pada perkumpulan yang didirikan Raden Fatah dan para wali di Jawa terlihat kata Syarikat belum digunakan tetapi justru menggunakan istilah yang menjadi inti kegiatan perkumpulan itu " bayangkari" berarti penjaga, pertahanan yang kukuh untuk kebajikan dan Ishlah berarti suasana yang penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kemajuan. Jadi kata Bayangkari Ishlah menyatakan bahwa perkumpulan ini mempunyai visi menjaga keutuhan dan menjadi garda terdepan upaya perwujudan kemashlahatan umat manusia. Istilah Syarikat dan Jamaiah serta Ittihad di Indonesia, mulai digunakan pada wal abad ke XX, Kedua kata ini dapat disinonimkan dengan kata organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa latin, organum yang berarti alat, bagian, unsur, unit, anggota, atau badan. Secara definisi organisasi adalah unit sosial yang sengaja dibangun atau distrukturkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks institusi pendidikan, organisasi dapat didifennisikan sebagai unit sosial yang berbasis pada ideologi akademik dan atau vocational yang sengaja dibangun dan distrukturkan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien. Tujuan itu idealnya dicapai melalui proses yang elegan berupa suasana yang kondusif iklim yang sehat berbasis realitas dan manusiawi dengan hasil yang optimum. (Danim, 2010)

a. Dinamika Pengorganisasian Pendidikan Islam

Seiring dengan gerakan pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh, ulama di tanah air juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan

agama. Upaya dilakukan dalam dua bentuk . Pertama dengan melakukan perubahan langsung dalam pola pengajaran dari bentuk halaqah ke klassikal, dan memasukkan pelajaran pengetahuan umum seperti berhitung dan ilmu ukur serta membuat penjenjangan pendidikan berdasarkan usia dan bahan yang dipelajari menggantikan sistem pengajian berdasarkan telaah kitab. Kedua dengan membentuk organisasi penyelenggara pendidikan. Dibawah organisasi inilah penyelenggaraan pendidikan dikembangkan . Bentuk yang kedua ini sebagaimana dikemukakan terdahulu pada abad ke XV telah diawali dengan pembentukan Bayangkari Ishlah.(Marwan Sarijo,1999,27) Gagasan ini sangat mencengangkan mengingat pada masa itu belum ada bentuk organisasi pendidikan yang muncul apalagi ketika itu pengaruh ulama sangat menonjol dan kharismatik dan masih kuatnya pandangan bahwa ulama adalah perantara antara manusia dan Tuhan. Mungkin ulama ingin menyatakan bahwa Islam memposisikan guru sebagai orang menjelaskan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya dan hubungan seseorang dengan Allah sang pencipta adalah hubungan langsung, makin tinggi dan luas ilmu dan amal seseorang maka makin dekat dengan dan terbuka hubungan dengan Tuhannya. Berbeda dengan pandangan agama diluar Islam. Maka untuk itulah Raden Fatah dan ulama lainnya (wali songo) mendirikan organisasi bayangkari Ishlah ini. Salah satu misi organisasi ini adalah menghilangkan sinkritisme, perbuatan syirik dan khurafat dan membina masyarakat muslim yang berperadaban mulia dan sejahtera. Perkumpulan ini kemudian mendirikan Pesanteren Gelagah Arum pada tahun 1476. Gelagah

Arum selain mendidik santri menguasai ilmu keIslaman diberikan juga ketrampilan mengukir dan seni membuat bangunan serta membatik.

Tidak terdapat data yang menunjukkan pada abad berikutnya ada dibentuk organisasi pendidikan Islam seperti itu. Baru muncul kecenderungan umum untuk membentuk badan pengelola pendidikan pada awal abad ke XX . Jamiyah Mahmudiyah li Thalabi Khairiyah termasuk satu diantara organisasi pendidikan yang berdiri pada masa itu. Jamiyah Mahmudiyah didirikan pada tanggal 31 Desember 1912, dua bulan setelah Parsyarikatan Muhammadiyah pada tanggal Oktober 1912 di didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Jogjakarta.

Tercatat organisasi Islam di tanah air pada awal abad ke XX adalah Serikat Dagang Islam (1904), Kemudian menjadi Syarikat Islam Jam 'iat Khair (1905) Persyarikatan Muhammadiyah (1912), Jamiyah Mahmudiyah li Thalabi Khairiyah (1912), Ishlah wal Irsyad (1913) dan PERSIS (Persatuan Islam) (1913) Nahdhatul Ulama (1926), Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI) 1928 Jamiyatul Washliyah (1930) dan Ittihadiyah (1930). Persyarikatan Ulama Islam (PUI) (1932) dan lainnya. Dari cacatan itu pada tahun 1912 ada empat organisasi yang berdiri yaitu Serikat Islam . Muhammadiyah dan Jamiah Khairiyah serta Jamiyah Mahmudiyah Li Thalabi Khairiyah yang berdiri pada 31 Desember 1912 atau seratus tahun yang lalu.

Jika dicermati dari organisasi tersebut maka didapati satu polarisasi yang lebih kurang memiliki kecenderungan atau karakteristik yang sama. Pola

yang pertama adalah organisasi yang tumbuh melalui jalur pendidikan. Organisasi didirikan semula bertujuan menyelenggara kan pendidikan namun dalam perkembangannya melebarkan diri menjadi organisasi yang meliputi bidang tabligh, kegiatan sosial untuk yatim piatu, pendidikan umum yang ditambah pendidikan agama. pemeliharaan orang sakit, fakir miskin, kegiatan ilmiah, propoganda dan penerbitan publikasi , selanjutnya mengembangkan pula pendidikan tinggi. Pola seperti ini terlihat menonjol menjadi ciri pada organisasi yang semula organisasi pendidikan seperti Muhammadiyah dan Alwashliyah. Pola kedua menekan kegiatan pada Tabligh dan publikasi, pada fase perkembangannya juga menyelenggarakan kegiatan sekolah, kegiatan sosial dan kesehatan Pola ini sangat kental terlihat pada gerakan PERSIS bahkan sejak tahun 1936 PERSIS makin terlibat dalam gerakan nasionalisme dan politik. Pola ketiga organisasi yang muncul dari kegiatan menggalang zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Islam, dan kegiatan memperbaiki taraf hidup ummat, pola ini terlihat pada organisasi SDI yang berubah menjadi Syarekat Islam dan Persatuan Ulama Islam yang di dirikan Abdul Halim dari Majalengka. Pola ke empat organisasi politik yang berkegiatan juga dalam penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan majlis taklim. Kecenderungan pola ini tampak pada Nahdhatul Ulama, Syarekat Islam ketika menjadi PSSI (partai Syarikat Islam Indonesia) Kemudian pasca kemerdekaan muncul Pola kelima adalah organisasi yang diselenggarakan pemerintah dibawah kementerian Agama yang menyelenggarakan secara regular penyelenggaraan pendidikan Islam dan

semua urusan umat Islam dan ummat beragama lainnya dalam berbangsa dan bernegara, Departemen agama/ kementerian agama mengurus juga organisasi perjalanan haji, penerangan agama, bimbingan masyarakat Islam, dan penyusunan regulasi semua aspek penyelenggaraan kerukunan kehidupan umat beragama.

Pola keenam organisasi keuangan Islam, mengembangkan sistem perbankan dan keuangan,serta asuransi syariah dan mendorong pendidikan ekonomi syariah

Pola ketujuh, Organisasi Dakwah, mengembangkan kegiatan dakwah, dalam bentuk tabligh, penerbitan dan majlis zikir serta majlis taklim pola ini tampak pada DDI, DMI. Pola ke delapan organisasi profesi dan kecendikiawanan, mengembangkan pembinaan profesi dan juga melaksanakan pendidikan dan latihan untuk anggota dalam bentuk majlis taklim dan memperluas kegiatan pada mengkonsolidasi potensi ummat untuk beasiswa, mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Pola ini terlihat pada ICMI, IPHI, MUI, KBIH, BWI.

Organisasi pola pertama yang semula memang didirikan untuk pembangunan Pendidikan Islam dalam perkembangannya melebar pada urusan ummat maka untuk penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada bidang atau departemen organisasi yang disebut dengan Majlis Pendidikan dan pengajaran hal ini dilakukan di Al-Washliyah dan Muhammadiyah sedangkan Nahdhatul Ulama menyerahkan kepada satuan tugas yang diberi nama Al-Maarif dan Rabitah Ma'had untuk pengurusan pengembangan Pesanteren. Sedangkan

organisasi pola kelima yaitu kementerian agama secara intensif mengupayakan pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dan menjadi regulator serta fasilitator pengembangan manajemen pengelolaan dan kurikulum. Sedangkan organisasi Islam lainnya yang teridentifikasi pada tujuh pola pada klasifikasi diatas pada dasarnya mempunyai perhatian terhadap pendidikan Islam namun sifatnya komplementer untuk kepentingan eksistensi organisasi dan pada waktu tertentu malah bersifat pragmatis dan politis.

Jama'iyah Mahmudiyah yang berdiri pada 31 Desember 1912 adalah satu diantara organisasi pendidikan yang dari sejak awal berdirinya untuk mengembang dan memajukan pendidikan Islam. Latar belakang berdirinya agaknya tidak jauh berbeda dengan motif gagasan Nizhamul Mulk mendirikan Nizhamiyah. Sebagai organisasi Pendidikan Jama'iyah Mahmudiyah mencatat prestasi yang membanggakan serta beberapa gagasan pembaharuan yang sangat berpengaruh. Jika di telusuri Jama'iyah Mahmudiyah Li Thalabi Khairiyah dalam dinamika organisasi selain mendirikan madrasah Maslurah dan Aziziyah juga memiliki jaringan kerjasama dengan Al-Azhar Mesir dan Umul Qura Mekah, kedua Universitas itu pernah mengirimkan tenaga pengajar untuk memperkuat sistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aziziah. Jama'iyah Mahmudiyah juga mengirim Tenaga Pengajar untuk memperdalam ilmu ke kedua universitas tersebut dan juga ke Sarbone Perancis. Para guru yang dikirim belajar itu kemudian menjadi guru dan ulama terkemuka Jama'iyah Mahmudiyah. Melalui mereka pula pendidikan Islam di masyarakat berkembang

luas. Secara aktif guru guru Jama'iyah Mahmudiyah mengadakan tabligh dan mengajar diberbagai majlis pengajian diwilayah kabupaten langkat dan sekitar sampai ke Aceh Timur. Organisasi ini tercatat pernah pula menerbitkan majalah Islam bernama " Bintang Islam" terbit mulai tahun 1936 s/d 1942. Aktivitas pengorganisasian pendidikan yang dilaksanakan menposisikan keberadaan Jama'iyah Mahmudiyah sebagai organisasi pendidikan telah berhasil menjadikan Langkat kota Tanjung Pura pusat pendidikan agama dan kehidupan masyarakat Islam yang thaat dan masyarakat pebelajar (*Learning and religius Society*) . Namun dibanding dengan organisasi yang seusianya Jama'iyah Mahmudiyah tidak tumbuh berkembang keluar dari kota Tanjung Pura, sejak pasca kemerdekaan roda organisasi Jama'iyah Mahmudiyah se-olah-olah berhenti, penyelenggaraan pendidikan berjalan secara alamiah dikordinir oleh Kepala kepala Madrasah. Kondisi inipun dapat berjalan karena diuntungkan pihak pengurus Jam'iyah Mahmudiyah menerima realiasi permohonan bantuan yang diajukan ke pemerintah daerah untuk membangun gedung Madrasah dilokasi bekas Madrasah lama yang musnah terbakar pada masa dipakai oleh TNI dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Geliat Jama'iyah Mahmudiyah ada terlihat pada tahun 1981 pengurus sepakat mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS Jama'iyah Mahmudiyah) yang mengasuh fakultas Tarbiyah dan Syariah . Saat ini telah melaksanakan wisuda sarjana yang ke XXI.

Keberadaan kementerian agama yang mengurus pendidikan agama dan keagamaan banyak membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan

agama Islam termasuk bagi Jamaiyah Mahmudiyah terutama dalam menjalankan regulasi dan upaya perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran serta keberadaan pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan Madrasah Negeri dapat dijadikan barometer bagi madrasah swasta terutama dengan ditetapkannya Madrasah Negeri sebagai Kordinator gugus ataupun rayon.

Dewasa ini kementerian agama memprioritaskan pembinaan madrasah swasta dan pesanteren untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan.

Peran kementerian agama yang menonjol dan semakin dominan secara tidak langsung menggeser majlis-majlis pendidikan organisasi Islam menjadi subordinat Mapenda / Pekaponteran dan Penamas. dua sub direktorat kementerian agama yang mengelola pendidikan agama dan keagamaan. Bersamaan dengan itu tumbuh yayasan yayasan pendidikan yang independen baik atas nama kelompok organisasi sosial kemasyarakatan lokal, keluarga ataupun induvidu yang pembinaannya langsung dibawah kementerian Agama. Umumnya lembaga pendidikan yayasan ini sepenuhnya mengembangkan pendidikan secara homogen dan regulatif sesuai kebijakan yang dikembangkan kementerian agama. Diantara yayasan baru itu terdapat lembaga pendidikan yang memisahkan diri dari induk organisasinya baik NU, Al-Washliyah, Ittihadiyah ataupun lainnya ataupun diidirikan oleh beberapa orang warga organisasi Islam tersebut. Beberapa diantara yang lain didirikan oleh pemilik modal dan sedikit diantaranya didirikan oleh penggiat dan pakar pendidikan.

Kesemarakan pendidikan agama dan keagamaan ini ternyata belum diikuti dengan dampak yang signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia. Tercatat makin mencuatnya berbagai persoalan seperti dekadensi moral, tawuran antar pelajar, perang antar kampung, tindakan anarkis, pelanggaran HAM, mafioso, angka pengangguran yang meningkat, penyalahgunaan jabatan, narkoba, tindakan brutal, terorisme. Persoalan ini ditambah dengan makin meningkatnya angka kemiskinan dan gejala disintegrasi bangsa. Kesemuanya menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis multi dimensi yang berawal dari krisis kebudayaan yang merembes kepada krisis moral, ekonomi, hukum dan semua aspek kehidupan.

Hal ini menjadi tantangan bagi semua organisasi kelembagaan pendidikan Islam untuk memberikan solusi yang tepat. Jamaiyah Mahmudiyah sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua yang memasuki usia 100 tahun yang pernah berhasil membangun langkat menjadi pusat pendidikan Islam dan wilayah masyarakat Islam yang thaat, tentunya tidak lepas dari tanggung jawab untuk mengatasi persoalan ini. Secara umum, ada tendensi ketidak berdayaan organisasi pendidikan untuk menghadapi tantangan itu. Hal itu diasumsikan karena melemahnya peran dan perhatian masyarakat dan organisasi Islam / pendidikan Islam. Peran masyarakat melemah karena memandang pendidikan adalah urusan pemerintah disamping itu pengikut sertaan dari lembaga, yayasan pendidikan yang ada juga sangat terbatas. Sedangkan peran organisasi Islam melemah disebabkan penyelenggaraan pendidikan selama ini tidak lagi menjadi prioritas organisasi sebab kegiatan

itu telah dilimpahkan ke Majelis Pendidikan yang dalam tugasnya lebih sebagai sub ordinasi dari bidang pendidikan agama dan keagamaan kementerian agama. Kebijakan ini menimbulkan tidak terdapat sinergitas yang memperkuat pendidikan dalam kegiatan semua bidang organisasi, ditambah lagi adanya tendensi untuk melakukan gerakan politik praktis. Dipihak lain adanya gejala entropy yang sampai pada tahap perpecahan dalam organisasi atau yayasan pendidikan Islam.

Berbagai upaya penguatan Pendidikan agama dan keagamaan baik dalam pembenahan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, perbaikan sistem kurikulum dari kurikulum subjek akademik kepada kurikulum kompetensi dalam tingkat satuan pendidikan, pengembangan manajemen mutu berbasis madrasah, sistem supervisi dan bantuan lainnya sepertinya belum memberikan bekas.

Kondisi dinamika organisasi Pendidikan Islam ini tentunya memerlukan daya dorong untuk optimalisasi dalam upaya pembangunan sumber daya manusia.

b. Beberapa Langkah Optimalisasi Organisasi Pendidikan

Perlu usaha ekstra keras untuk meretas ketidakberdayaan organisasi Pendidikan merespon tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara teoritis Keberdayaan Sistem pendidikan sesungguhnya ditentukan oleh supra sistem dan infra sistem dan sentra sistem pendidikan. Supra sistem adalah budaya/kemajuan IPTEK dan agama, infra sistem keluarga dan masyarakat serta pemerintah dan sentra sistem penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan

in formal yang dilakukan oleh organisasi pendidikan.

Keseluruhan sub sistem ini haruslah diorganisasi secara terpadu. Supra sistem pendidikan haruslah menjadi sumber dan landasan sekaligus orientasi pengembangan pendidikan sedangkan infra sistem sebagai stake holder menjadi penentu pengembangan dan peningkatan mutu yang elaborasinya berlangsung pada sentra sistem. Membiarkan sentra sistem terpisah dengan sub sistem lainnya sebagaimana berlangsung pada organisasi pendidikan Islam dewasa ini membuat pendidikan mengalami disorientasi, aleniasi dan tidak nyambung dengan keperluan hidup, tidak berpengaruh bagi perubahan kualitas hidup keluarga yang lebih baik. Dipihak lain tingkat partisipasi menjadi berkurang jika tak bisa disebut tidak ada.

Kemudian orientasi penyelenggaraan pendidikan menjadi terkondisi untuk pencapaian target berupa standar minimal yang sudah ditetapkan bukan justru untuk merespon dan mensponsori kemajuan dalam bentuk penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan serta menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif yang tidak tercerabut dari akar budaya serta tidak mengalami split personality, dan memiliki kepribadian yang berakhlakul karimah dan taat.

Langkah optimalisasi sistem organisasi pendidikan ini dapat dilakukan dengan melakukan pemahaman yang benar terhadap pembangunan sumber daya manusia terutama terkait dengan kondisi sosial budaya, kemajuan IPTEK dan nilai nilai agama. Dengan mengembangkan telaah kesepadanan dan keterapaduan antara kebutuhan dan tantangan masa

kini. Memperbaiki semua ketidak sepadanan yang dihadapi dengan langkah langkah realistik untuk menggantikan dengan situasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang momot nilai (*contemporary inaduaties*) serta kesepadanan dan keterpaduan antara kebutuhan dan tantangan masa depan (*futuristic inaduaties*).

Sebagai landasan untuk telaah kesepadanan dan keterpaduan ini suatu wawasan yang diberikan Al-Quran pantas dijadikan landasan (*frame of reference and frame of thinking*) Pada surat Al-Mudatsir Allah SWT meletakkan prinsip dasar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu (1) Melakukan Perubahan paradigma dari; kegelapan, keterbatasan, ketertutupan, keterbelakangan, ketiadaan tanggung jawab sosial, kejahatan (terdinding selimut tebal) kepada kebangkitan, keterbukaan, kemajuan, peningkatan terus menerus kualitas hidup dan kerja-kerja kemanusiaan. (2) Melakukan Pemberdayaan dan Pembudayaan Proses Pendidikan). Dijelaskan ada tiga pilar strategis dalam penyelenggaraan pengorganisasian pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia itu yaitu ; (a) Pensucian kehidupan dalam bentuk thaharah induvidual, material, rational, sosial, emosional. (b) Pengagungan Allah yang bersumber pada tauhid dan bermuara pada keshalehan esensial-personal dan eksistensial-sosial (c) penghindaran, penanggulangan dan pemberantasan segala bentuk kekejian (Khuda Bukhesh, tt, 256, H.H. Bilgrami, 1986, 6)

Selanjutnya dalam tataran sentral sistem langkah optimalisasi dapat dilakukan dengan pembelajaran yang

terintegrasi yang secara epestimologis dikembangkan lewat aspek etis, psikologis, historis, dan observatif eksprimmentatif. (HH. Bilgrami, 1986, 7-8) atau bersifat *heuristik* dan *inquiry*

Dengan kata lain organisasi pendidikan Islam seperti Jamaiah Mahmudiyah harus melakukan reinventing dengan memperjelas visi dan misi agar relevan dengan kepentingan zaman dan memimpin perubahan yang ada kearah yang benar.

Dalam proses pendidikan pendekatan yang lebih terintegrasi dan memberdayakan (*heuristic learning dan Inquiry learning*) harus dilakukan. Dengan model pembelajaran itu maka pendidikan tidak saja mengembangkan kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional, spritual, sosial, aplikatif dan kultural. Atau yang disebut Howard Gadner sebagai *Multiple intelegence* kecerdasan majemuk Karena dengan demikianlah proses transformasi dan transinternalisasi serta trans eksternalisasi nilai dapat menjawab krisis multi dimensi yang sedang dihadapi bangsa ini. Disinilah peranan optimalisasi organisasi pendidikan akan dapat meletakkan dasar dasar yang kuat didalam pembangunan sumber daya manusia yang akan dijadikan fondasi untuk membentuk budaya masa depan yang lebih jelas dan terarah. Berbagai gagasan untuk membangun kerjasama kepakaran dan study lanjut bagi para guru yang sudah dirintis serta pengembangan jaringan informasi dan komunitas pebelajar yang thaat (*learning and religious society*) sebagaimana pernah dilakukan pada masa awal Jamaiah Mahmudiyah agaknya perlu ditindak lanjuti

disamping perlunya upaya *benchmarking* keberhasilan organisasi pendidikan lainnya ditanah air. Suatu hal yang agak lambat direspon adalah keberadaan madrasah kejuruan sedangkan payung hukumnya sudah ada pada UU Sistem pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 maka selayaknya Jamiyah Mahmudiyah dapat membuat terobosan untuk membuka Madrasah Aliyah Kejuruan. Tentu pihak Kemenag akan mendukung usaha ini jika Jamiyah mau melakukannya. Langkah ini juga dapat menjadi cikal bakal membuka program studi esakta di tingkat pendidikan Tinggi

Langkah optimalisasi lainnya pada tataran infra sistem adalah dengan mengembangkan manajemen mutu terpadu yang berbasis masyarakat (*total quality and community based management*) karena dengan terus menerus melakukan peningkatan kualitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan masyarakat. Model ini direkomendasikan UNICEF agar pendidikan diabdikan untuk bersama-sama dan dari masyarakat sendiri (Unicef, 1999) Dengan pengembangan model manajemen ini maka organisasi pendidikan akan mampu mewujudkan masyarakat madani (*civil society*)

Optimalisasi organisasi pendidikan seperti Jamiyah Mahmudiyah yang sudah memasuki usia 100 tahun menjadi suatu keniscayaan, kebutuhan dan harapan semua pihak. Oleh karena itu organisasi ini perlu melakukan *reinventing* untuk menemukan kembali jati diri dan *selling point* dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih komprehensif.

Berbagai harapan untuk peran yang dapat dijalankan untuk mengatasi krisis multi dimensi

yang dihadapi bangsa dan menjadikan Jamiyah Mahmudiyah sebagai pusat peningkatan peradaban akan dapat dilakukan dengan semangat dan kerja keras dari seluruh komponen pengurus dan stake holder.

Langkah langkah optimalisasi yang dikemukakan pada kesempatan pidato ilmiah ini untuk melakukan *reinventing*, mengembangkan sistem organisasi yang terpadu antara supra, sentra dan infra sistem pendidikan, melakukan pembaharuan orientasi strategis pembelajaran dan melakukan *benchmarking*, pengembangan program *community development* dan madrasah kejuruan serta pengembangan manajemen mutu terpadu berbasis masyarakat adalah langkah yang secara umum dapat dilakukan oleh organisasi pendidikan dalam menjalankan peran dan fungsinya membangun sumber daya manusia.

Semoga uraian ini bermanfaat sebagai pemicu untuk melejitkan Jamiyah Mahmudiyah sebagai organisasi pendidikan Islam yang maju dan terpadang.

B. Memberdayakan Keunggulan Madrasah Ke Masa Depan

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam formal yang mulai berkembang seiring dengan makin besarnya perhatian berbagai kalangan dalam Islam tentang pentingnya pendidikan. Sejak itu bentuk pendidikan formal ini berkembang diberbagai daerah. Jika dilihat dari pertumbuhannya maka madrasah adalah bentuk baru dari lembaga pendidikan yang ada yang bersifat non formal seperti pengajaran yang berlangsung di Mesjid, Maktabah dan di berbagai majlis Ilmu serta rumah para ulama. Generasi baru lembaga

Berselang kemudian tumbuh madrasah lainnya seperti Madrasah Yunusiah yang didirikan Syech Zainuddin Labai di Padang Panjang Sumatera Barat yang didirikan 10 Oktober 1915 dan Madrasah Maslurah berdiri tahun 1899 dan Madrasah Mahmudiah 31 Desember 1912 di Tanjung Pura Sumatera Timur. Pada tahun 1910 Thaib Umar di daerah Batu Sangkar di daerah Sumatera Barat mendirikan Madras School, lembaga pendidikan ini juga belum menggunakan kata madrasah. Pemakaian kata madrasah jelas lebih awal dan pertama sekali dipakai di nusantara adalah pada lembaga pendidikan Jam'iyah Mahmudiyah li thalabil Khairiyah Langkat Sumatera Timur. Kemunculan madrasah di kedua daerah ini menarik untuk dicermati sebagai awal pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Jika di Sumatera Barat kehadiran Madrasah lebih dilatar belakangi oleh pembaharuan sistem pendidikan Islam untuk menggulangi keterbelakangan sistem pendidikan Islam yang ada dimasa itu maka di Sumatera Timur justru Madrasah didirikan sebagai lembaga pendidikan untuk generasi muda Islam sebagai wahana pembinaan generasi muda masyarakat muslim yang membutuhkan pendidikan yang setara dengan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Karena pendidikan di Mesjid dan di Istana yang selama ini memenuhi keperluan tersebut dipandang tidak lagi mampu menampung kebutuhan pendidikan dan pengajaran. Madrasah Maslurah atau Madrasah lil Banat dan Madrasah Mahmudiyah ini memberikan juga pengetahuan umum selain ilmu agama. (Mahmud Yunus, 1982, Fachruddin, 2013, 65) Madrasah ini di bimbing oleh ustaz atau guru yang sebahagian diantaranya tamatan Al-Azhar. Bahkan untuk beberapa waktu beberapa orang guru dan ulama dari Azhar bertugas mengajar di Madrasah ini. Siswa madrasah ini datang dari berbagai daerah

kawasan Sumatera Timur dan daerah lainnya di tanah air seperti daerah Riau, Sumatera Barat, Kalimantan, Tapanuli Selatan, dan Semenanjung Malaysia. Banyak tamatan Madrasah ini melanjutkan pendidikannya ke Mekah dan Mesir dan kembali ketanah air membina serta membangun Madrasah serta Pesanteren.

Pada masa selanjutnya Madrasah menjadi lembaga pendidikan formal dalam sistem pendidikan Islam Indonesia. Bahkan di beberapa daerah madrasah disebut dengan dialek setempat Mendersah, Meunasah di Aceh, Sebutan Mendersah ini ternyata menunjukkan tempat belajar ilmu tasawuf atau melakukan suluk. seperti di daerah Basilam atau Babus Salam, dan tempat mengaji atau majlis taklim pada beberapa daerah di Asahan.

Madrasah pada perkembangannya memiliki dua tingkatan madrasah rendah dan madrasah tinggi, Madrasah rendah memberikan pendidikan pengajaran tingkat dasar samapai pendidikan menengah atas sedang madrasah tinggi memberikan pengajaran yang lebih luas dan mendalam yang disebut dengan tahassus. Pembahagian ini berlangsung sebelum berkembang lembaga pendidikan tinggi, pada masa pendudukan Jepang kecenderungan untuk mendirikan Pendidikan Tinggi makin menguat sehingga penjenjangan madrasahpun mengalami perubahan menjadi madrasah tingkat Tazhijiyah dan Tsanawiyah dan selanjutnya Madrasah Tahassus. Berupa pengajian Tafsir dan permasalahan sosial kemasyarakatan.

Madrasah dalam perkembangannya kemudian mengenal tingkatan madrasah, ibtdaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Pada awalnya madrasah di beberapa daerah hanya mengajarkan pendidikan ilmu agama saja. namun kemudian

madrasah madrasah tersebut mengikuti pola madrasah Yunusiah di Sumatera Barat maupun madrasah Maslurah dan Mahmudiah di Sumatera Timur yang memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Perkembangan madrasah yang memasukkan pengetahuan umum pada kurikulumnya ini tidak berarti madrasah dalam pola lama hilang. Masyarakat Islam memandang justru madrasah pola lama yang hanya memberikan pengetahuan agama harus tetap tumbuh dan dipelihara kemudian mengambil kekhasannya dengan nama Madrasah Diniah. Kemudian dalam regulasi yang diatur kementerian agama dikembangkan dalam bentuk Madrasah Diniah Awaliah, Wustha dan Ulya.

Kementerian Agama mempunyai peran penting untuk memposisikan Madrasah dalam kehidupan berbangsa dengan kebijakan menghubungkan semua program pembangunan dengan program Madrasah seperti pada sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan adanya gagasan untuk mengembangkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dan Madrasah Pembangunan yaitu Pendidikan Madrasah yang membuka pendidikan untuk sektor kehidupan yang terkait dengan program pembangunan dengan nama Madrasah Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Perikanan dan lain sebagainya (Malik Fajar 1997.151, Marwan Sarijo, 1996.166) Namun upaya ini tampaknya tidak dilanjutkan. Meskipun demikian gagasan ini tidak pernah hilang dan tetap terpelihara dalam bentuk adanya upaya memasukkan program ketrampilan dalam muatan lokal kurikulum Madrasah dan kemudian pada era reformasi menjadi lebih konkrit dengan wujud Madrasah Kejuruan pada UUSPN NO 20 tahun 2003.

Upaya untuk mengembangkan eksistensi madrasah ini tidak pernah surut sampai dalam perkembangan selanjutnya

diakui sebagai sub sistem pendidikan nasional terutama setelah pada sebelumnya ada kecenderungan eksistensi Madrasah disatukan dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Keppres Nomor 34/1972 dan Inpres Nomor 15/1974 yang menginstruksikan pelaksanaan Keppres 34/1972. Atas usul MP3A maka disusun gagasan untuk memposisikan Madrasah memiliki persamaan dan kesetaraan dengan sekolah meskipun tetap dikelola oleh kementerian agama sebagai kementerian yang bertanggung jawab penuh tentang kekhususannya. (Zakiah Daradjat, 1999, xiii) Atas usul dan pertimbangan itu Menteri Agama memperakarsai kesepakatan pemerintah yang pada tahun 1975 melahirkan SKB 3 Menteri yang memberikan legalitas kesamaan dan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dengan SKB 3 Menteri ini kedudukan Madrasah menjadi sub sistem pendidikan nasional. Dalam dinamika pertumbuhannya madrasah melakukan penyesuaian dalam kurikulum dan juga tenaga pendidik serta kelengkapan sarana prasarana. Selanjutnya untuk memelihara ciri khas Madrasah terutama untuk memenuhi keperluan tenaga teknis keagamaan dan ahli agama maka kemudian dibuka Madrasah Aliyah Keagamaan dengan nama MAN PK.

Keberadaan SKB 3 Menteri dipandang sebagai landasan integrasi pendidikan agama kedalam sistem pendidikan nasional dan sekaligus modernisasi madrasah meretas dikhotomi kelembagaan. Pokok pikiran yang terkandung pada SKB 3 Menteri ini kemudian menjadi landasan untuk penyusunan UU Sistem Pendidikan Nasional dan memasukkan Madrasah sebagai sub sistem pendidikan Nasional. Pada undang-undang ini Madrasah dinyatakan sebagai sekolah bercirikan Islam Eksistensi Madrasah semakin kokoh pada UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun

2003. Madrasah disamakan dengan Sekolah. Istemewanya pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini memasukkan pula pendidikan keagamaan sebagai bahagian dari sitem pendidikan Nasional. Kemudian legalitas keberadaan pendidikan keagamaan termasuk madrasah diniah tersebut diatur berdasarkan PP no 55 tahun 2007. Suatu hal yang perlu dicatat pula dalam uu sisdiknas no 20 tahun 2003 telah pula dinyatakan eksistensi Madrasah Ikhtisas berupa madrasah kejuruan.

Dalam dinamika pertumbuhannya itu Madrasah ditinjau dari aspek kurikulumnya dapat diklasifikasikan menjadi: *Pertama* Madrasah yang memberi muatan lebih banyak mata pelajaran non keagamaan, *Kedua* Madrasah yang memberikan muatan lebih besar pada pelajaran agama, *Ketiga*, Madrasah yang mengutamakan pelajaran agama dan melengkapi dengan muatan lokal untuk mengintensifkan kejuruan atau orientasi keilmuan tertentu, dan *Keempat*: Madrasah yang memberi porsi pengetahuan agama 30 % dan umum 70 % agar tamatannya dapat melanjutkan ke sekolah atau ke perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta *Kelima* Madrasah yang hanya memberikan pelajaran agama (Madrasah Diniah) dan *keenam* madrasah kejuruan

Dari dinamika itu tampak bahwa Madrasah di Indonesia tidak terlepas dari akar sejarahnya sebagai gerakan modernisasi pendidikan Islam. Dinamika Modrenisme Pendidikan Islam ini menurut Syed Husain Nashar dan Ali Ashraf memiliki dua ciri pokok " (i) dia mempunyai ciri - ciri dasar yang tidak berubah , yang membedakannya dengan sistem-sistem lain ; jika ciri-ciri dasar ini hilang maka hilang pula sistem itu (ii) dia mempunyai satu mekanisme

untuk merubah ci-ciri yang tidak mendasar; jika mekanisme pengubah itu tidak terdapat , maka sistem itu tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan waktu dan ruang. Jika dengan demikian, sistem akan berhenti dan kemudian lenyap. (Ali Ashraf ; 1988,65) Mencermati pertumbuhan dan Dinamika Madrasah di Indonesia maka Madrasah memiliki karakteristik yang menjadi benang merah keberadaannya sebagai berikut ; (i) merespon perubahan dan perkembangan terhadap kebutuhan pendidikan, (ii) mengadopsi berbagai kemajuan dalam pendekatan dan pembaharuan pendidikan, (iii) mengantisipasi berbagai keterbelakangan dan ketertinggalan pendidikan Islam, (iv) melakukan rekayasa sosial untuk pemberdayaan pendidikan agama, (v) mengawal dan merevitalisasi keunggulan pendidikan Islam. Karakter itu menunjukkan kemampuan sekaligus keunggulan Madrasah menangkap esensi terdalam dari eksistensi pendidikan Islam untuk melakukan konstruksi sebagai langkah responsif, adoptif , adaptif dan antisipatif terhadap perubahan. (Fachruddin, 1998, hlm 277)

Keunggulan Madrasah

Sejak diperkenalkan bentuk pendidikan Madrasah di Indonesia pada awal abad ke XX Meskipun telah mengalami dinamika perubahan dan penyempurnaan kurikulum, status kelembagaan dan poliarasi spesifikasi, Madrasah sampai saat ini terus eksis dan menempati posisi penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami krisis baik krisis eksistensi bangsa pada masa penjajahan ,krisis ideologi politik tahun 1965 maupun krisis ekonomi pada tahun 1998 ternyata keberadaan madrasah sangat menentukan . Pada saat krisis itu madrasah telah tampil dan berada pada posisi sebagai benteng jati diri bangsa

sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki kepribadian nasionalisme religius melalui madrasah telah lahir pejuang kemerdekaan bangsa yang sukses menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan menjadi suatu negara yang berdaulat. Pada saat menghadapi krisis ideologi politik madrasah telah menjadi pusat pembinaan generasi yang sosial-religius yang menyelamatkan bangsa dari atheisme komunisme. Demikian pula ketika bangsa mengalami krisis ekonomi dan krisis nilai maka madrasah terbukti adalah sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk menyelamatkan bangsa ini untuk tetap menjadi bangsa yang moralitas religius. Dewasa ini di era globalisasi ternyata telah mengkondisikan generasi muda pada tren kemajuan yang cepat dan dampak negatif yang dominan yang menimbulkan terjadinya dekadensi moral, kejahatan trans nasional, gejala dehumanisasi, pola hidup permisivisme, materialisme sekular. Pendidikan madrasah yang tetap memberikan pendidikan keagamaan menempa siswa menjadi generasi yang berakhlak, taat pada aturan agama. Kompetensi itu menjadi bingkai dan alat yang ampuh untuk membina generasi muda yang mampu menyesuaikan diri dan membentengi diri dari pengaruh negatif era globalisasi. Dipihak lain dengan porsi pendidikan agama yang merupakan pendidikan nilai menposisikan Madrasah terbukti menjadi lembaga pendidikan yang tepat untuk membina karakter bangsa.

Pengetahuan Umum yang diberikan pada Pendidikan Madrasah secara tidak langsung dalam proses pembelajaran telah menumbuhkan daya nalar yang lebih berbasis nilai dan mendorong terjadinya persepsi integral komprehensif keilmuan pada diri siswa Madrasah sehingga menghindarkan peserta didik pada pemahaman yang split personality.

Kedudukan madrasah yang sama dan setara dengan sekolah pada dasarnya menjadi kelebihan dan keunggulan madrasah dari sekolah. Pendidikan Agama Islam yang diberikan di sekolah secara global justru di Madrasah dibahas atau dipelajari lebih terperinci dalam disiplin ilmu Aqidah-Akhlak, Al-Qur'an-Hadist, Fiqih, SKI dan bahasa Arab. Tentu keluasaan pembahasan Pendidikan Agama Islam ini menjadi keunggulan siswa madrasah yang menyebabkan posisi siswa madrasah lebih menguasai bidang studi ini. Sementara itu pelajaran umum yang diperoleh siswa madrasah dapat pula dikembangkan dalam bentuk elaborasi pembelajaran yang lebih efektif. Siswa Madrasah yang heterogen terdiri dari siswa dari sekolah dan dari madrasah membuka akses pengalaman belajar yang komprehensif dan dinamis dalam kelompok belajar yang aktif.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat Islam sesungguhnya memiliki dukungan yang kuat dan luas dari masyarakat. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk mengembangkan manajemen berbasis sekolah/ Madrasah. Serta memudahkan untuk menumbuhkan partisipasi yang tinggi dari stakeholder Madrasah.

Keunggulan Madrasah juga terjadi dari dinamika pertumbuhan madrasah itu sendiri yang sesungguhnya memiliki benang merah yang melekat sebagai karakteristik Madrasah. Hal ini merupakan keunggulan Madrasah yang sangat penting. Keadaan ini memudahkan untuk melakukan inovasi-inovasi dan juga upaya konstruksi dan responsi, adaptasi dan antisipatif.

Beberapa agenda pemberdayaan keunggulan Madrasah

Dari uraian pertumbuhan dan dinamika madrasah maka secara garis besar Madrasah memiliki keunggulan historis

sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua dan masih bertahan sampai saat ini dan memiliki kemampuan responsi, adaptasi dan inovasi yang tinggi terhadap berbagai situasi dan perubahan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan modern dengan kemampuan mengadaptasi model klasik dan penjenjangan dan muatan kurikulum dengan pengetahuan umum selayaknya terus memberdayakan keunggulan itu dengan segera mengadopsi model pembelajaran ICT yang sedang dikembangkan dewasa ini. Madrasah harus memberdayakan keunggulan itu dengan berada di depan dalam proses pembelajaran ICT tersebut.

Keunggulan Madrasah lainnya adalah dalam bentuk keunggulan status persamaan dan kesetaraan dengan sekolah umum. Keunggulan ini harus dioptimalkan dengan mengembangkan kelengkapan Madrasah bukan saja setara dan sama tetapi dapat melampaui sekolah baik secara kuantitas maupun kualitas.

Keunggulan kurikulum tentunya harus diberdayakan bukan dalam tataran pengayaan dan keteladan ataupun peran keunggulan dalam proses pengalaman belajar karena heterogenitas peserta didik tetapi dapat dikembangkan menjadi pembelajaran yang terintegrasi dengan pengembangan *open subjek integrated curriculum* dengan demikian dikhotomi keilmuan dapat dihilangkan. Output Madrasah akan sangat lebih baik kualitasnya ketimbang output sekolah. Selanjutnya Madrasah diniyah dapat merupakan tawaran untuk mengatasi kurangnya waktu untuk pendidikan agama di sekolah.

Kultur pendidikan Madrasah yang lebih bermuatan nilai haruslah diberdayakan untuk pembentukan keunggulan output yang berakhlakul karimah dan disenergikan tujuan pendidikan karakter. Sehingga madrasah lebih baik dan

pada urutannya masyarakat menjadikan pilihan lebih baik madrasah. Kondisi ini memungkinkan Madrasah mengembangkan keunggulannya dalam manajemen berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah secara penuh. Keunggulan natural yang dikemukakan diatas pada dasarnya dapat pula diikuti dengan keunggulan artifisial, yaitu keunggulan yang dibangun dan diupayakan oleh masing masing madrasah dalam mengembangkan dan mengemban visi dan misinya.

Posisi Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dibawah kementerian Agama pada dasarnya memiliki beberapa hambatan diantaranya hambatan administrasi manajemen. Sebagian besar urusan administrasi pendidikan ditangani oleh Kemendiknas seperti masalah NISN, NUPTK, Ujian Nasional dan lainnya. Demikian pula dalam alokasi anggaran. Namun diakui beberapa terobosan telah dilakukan seperti telah disiapkan pangkalan data untuk menangani persoalan madrasah. Pertumbuhan dan dinamika madrasah di Indonesia menunjukka adanya gejala Madrasah telah menjadi destinasi bagi orang tua untuk memasukkan anaknya. Sungguhpun diakui bahwa prekuensinya belum signifikan dibanding besarnya jumlah ummat Islam di Indonesia.

Madrasah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang mulai awal abad ke XX tercatat Madrasah yang pertama berdiri adalah Madrasah Maslurah (1899) dan Madrasah Mahmudiyah (1912) di Sumatera Timur dan Madrasah Yunusiah (1915) di Sumatera Barat. Madrasah merupakan lembaga pendidikan modern ummat Islam. Umumnya madrasah memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Namun tetap saja ada madrasah yang hanya memberikan pengetahuan agama yang disebut dengan Madrasah Diniyah.

Pemerintah melalui kementerian agama sangat intensif mengembangkan madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Beberapa kebijakan dilakukan seperti mendirikan madrasah wajib belajar dan madrasah pembangunan serta mengaitkan berbagai program pengembangan madrasah dengan program pembangunan. Legalitas madrasah dan integrasi dalam sistem pendidikan nasional mulai dengan adanya SKB 3 Menteri yang memberikan dasar persamaan dan kesetaraan Madrasah dengan sekolah. Kedudukan Madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional mejadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dan selanjutnya undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Diikuti dengan PP no 55 tahun 2007 tentang pendidikan Keagamaan.

Dalam dinamika pertumbuhannya itu Madrasah di Indonesia dari aspek kurikulumnya dapat diklasifikasikan menjadi: *Pertama* Madrasah yang memberi muatan lebih banyak mata pelajaran non keagamaan, *Kedua* Madrasah yang memberikan muatan lebih besar pada pelajaran agama, *Ketiga*, Madrasah yang mengutamakan pelajaran agama dan melengkapi dengan muatan lokal untuk mengintensifkan kejuruan atau orientasi keilmuan tertentu, dan *Keempat*: Madrasah yang memberi porsi pengetahuan agama 30 % dan umum 70 % agar tamatannya dapat melanjutkan ke sekolah atau ke perguruan tinggi yang berada dibawah naung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta *Kelima* Madrasah yang hanya memberikan pelajaran agama (Madrasah Diniah).

Mencermati pertumbuhan dan Dinamika Madrasah di Indonesia maka Madrasah memiliki karakteristik yang menjadi benang merah keberadaannya sebagai berikut ;

(i) merespon perubahan dan perkembangan terhadap kebutuhan pendidikan, (ii) mengadopsi berbagai kemajuan dalam pendekatan dan pembaharuan pendidikan, (iii) mengantisipasi berbagai keterbelakangan dan ketertinggalan pendidikan Islam, (iv) melakukan rekayasa sosial untuk pemberdayaan pendidikan agama, (v) mengawal dan merevitalisasi keunggulan pendidikan Islam. Karakter itu menunjukkan kemampuan sekaligus keunggulan Madrasah menangkap esensi terdalam dari eksistensi pendidikan Islam untuk melakukan konstruksi sebagai langkah responsif, adoptif, adaptif dan antisipatif terhadap perubahan.

Madrasah secara umum memiliki keunggulan historis, keunggulan status, keunggulan kurikulum dan keunggulan kultur. Keunggulan tersebut harus dapat diberdayakan secara optimal. Umpunya dalam keunggulan historis sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan menyerap perubahan maka Madrasah selayaknya terus memberdayakan keunggulan itu dengan segera mengadopsi model pembelajaran ICT yang sedang dikembangkan dewasa ini. Madrasah harus memberdayakan keunggulan itu dengan berada didepan dalam proses pembelajaran ICT tersebut. Dalam hal keunggulan status persamaan dan kesetaraan dengan sekolah umum. Keunggulan ini harus dioptimalkan dengan mengembangkan kelengkapan Madrasah bukan saja setara dan sama tetapi dapat melampaui sekolah baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya keunggulan kurikulum tentunya harus diberdayakan bukan dalam tataran pengayaan dan keteladan ataupun peran keunggulan dalam proses pengalaman belajar karena heterogenitas peserta didik tetapi dapat dikembangkan menjadi pembelajaran yang integrasi dengan pengembangan *open subjek integrated curriculum* dengan demikian dikhotomi keilmuan dapat

dihilangkan .Out put Madrasah akan sangat lebih baik kualitasnya ketimbang out put sekolah.

Kultur pendidikan Madrasah yang lebih bermuatan nilai haruslah diberdayakan untuk pembentukan keunggulan out put yang berakhlakul karimah dan disenergikan tujuan pendidikan karakter. Sehingga madrasah lebih baik dan pada urutannya masyarakat menjadikan pilihan lebih baik madrasah. Kondisi ini memungkinkan Madrasah mengembangkan keunggulannya dalam manajemen berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah secara penuh.

Agenda utama dan terpenting dalam pemberdayaan keunggulan madrasah kedepan adalah pada upaya mengembangkan keunggulan yang dibentuk dan dikembangkan Madrasah melalui visi dan misi serta renstranya masing masing.

Dengan berbagai upaya pemberdayaan keunggulan Madrasah ini maka diharapkan madrasah akan menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi bangsa Indonesia.

C. Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah Dan Semangat Kebangsaan

Organisasi sosial Pendidikan Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah yang pada tahun 1912 didirikan adalah organisasi pendidikan yang tertua di Nusantara. Organisasi ini berdiri pada masa belum ada organisasi sosial pendidikan didirikan. Kini Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah telah memasuki priode melium kedua tahun ini menginjak usia ke 104 tahun. Dalam kurun waktu yang panjang itu tentu diperlukan evaluasi yang terus menerus agar memiliki

dinamika yang oiptimal. Salah sartu upaya melakukan evaluasi adalah melakukan sharing forum silaturrahi pengurus dengan steak holder Secara teoritis silaturrahi mempunyai lima fungsi yaitu fungsi informatif yaitu dalam bersilaturrahi kita bertemu satu sama lain dan dapat saling memperoleh informasi berita kabar serta keterangan tentang situasi kondisi kita masing masing dan kemajuan kema juan yang telah dicapai. Kedua fungsi regulatif melalui silaturrahi kita dapat pula saling menginstrospeksi dan merajut upaya untuk menumbuhkan mekanisme tata aturan yang selama ini kurang berjalan baik atau sudah baik untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Ketiga Fungsi Preventif melalui silaturrahi kita dapat pula lebih menyegarkan hubungan komunikasi ikatan bathin sehingga jarak yang tercipta karena kesibukan dan tugas selama ini menjadi renggang yang jika berlarut dapat pula menumbuhkan ketidak pedulian satu sama lain, keempat fungsi koordinatif melalui selaturrahi kita dapat saling memperkuat jalinan kerjasama dan saling terbuka mencermati kekurangan dan kelemahan bersama, Kelima fungsi Integratif dengan silaturrahi kita dapat saling terbuka dan saling memaafkan berbagai kekurangan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sesuai dengan dengan itu rasulullah SAW menyatakan bahwa silaturrahi dapat memanjang kan usia dan membuka rezeki. Fakta menunjukkan ketika silaturrahi sebagai media komunikasi tidak terpelihara dan dijaga dalam suatu organisasi maka organisasi itu akan mengalami krisis dan mengidap gejala entropi yaitu suasana bathin yang tidak menyenangkan dan saling curiga serta sikap merasa benar sendiri kondisi ini lazimnya menyebabkan organisasi itu akan bangkrut lambat laun bubar dan tidak panjang usianya. Ketika silaturrahi dikem bangkan maka insya Allah organisasi itu akan mengalami pertumbuhan dan

peningkatan terus menerus serta mendapatkan rezeki yang banyak. Pada silaturahmi 100 tahun Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil khairiyah yang dihadiri Bapak Menteri Agama para tokoh dan juga Bapak Bupati, Jam'iyah Mahmudiyah dinyatakan akan diberikan bantuan pembangunan gedung sebesar gedung Jamiyah Mahmudiyah yang lama berlantai dua demikian juga bapak Bupati menyatakan akan membantu membangun gedung perkuliahan, melalui bapak Sekda kami berharap dalam kesempatan yang baik ini gedung tersebut telah dapat mulai direalisasikan bapak bupati. Kami Pengurus Besar Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak selama ini kepada Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah baik untuk kepentingan peningkatan mutu Sekolah Tinggi, maupun pendidikan dan pengajaran di Madrasah. Tentunya kami juga menyampaikan permohonan maaf atas nama PB dan lembaga pendidikan mungkin selama ini belum dapat memenuhi berbagai program dan peningkatan kinerja dan serta pengabdian kepada masyarakat.

Kedepan Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil khairiyah perlu lebih mengembangkan sayapnya menjadi organisasi pendidikan dan sosial masyarakat yang potensial bagi daerah kabupaten Langkat dan bagi bangsa umumnya.

Keinginan ini adalah tekad pengurus dan kita semua dan kami berharap juga menjadi bagian dari tekad dan program pemerintah daerah. Karena Jam'iyah Mahmudiyah sebenarnya bukan saja kekayaan sejarah Tanjung Pura sebagai kota pelajar yang pertama di tanah air tetapi juga kekayaan daerah kabupaten langkat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu hendaknya Jam'iyah Mahmudiyah bisa lebih menonjol dan menjadi bagian utama kebanggaan dan program pembangunan daerah dan masyarakat langkat.

Pada berbagai kesempatan sangatlah perlu untuk mengutarakan eksistensi Jam'Iyah Mahmudiyah li Thalabil khairiyah mencakup semangat dan gagasan utama berdirinya Jam'iyah Mahmudiyah li thalabil khairiyah hubungan dengan semangat kebangsaan serta tujuan dan kifahnya Dengan lebih dikenal dan dipahami hal ini maka diharapkan kita semua memiliki etos kerja yang kuat dan tinggi dan orientasi yang jelas untuk mengembangkan dan memajukannya. Kita sangat berkepentingan tumbuhnya rasa memiliki dan sekaligus rasa bertanggung jawab untuk menghidupinya. Karena jangan sampai rasa memiliki justru terbelokkan atau berbelok hanya untuk kepentingan sesaat dan kepentingan sendiri.

a. Jam'iyah Mahmudiyah Organisasi Pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang pertama di Nusantara.

Saat ini Jamiyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah telah memasuki usia ke 104 tahun tentu lebih tua dari Republik ini yang tahun ini memasuki usia 71 tahun. Jam'iyah Li Thalabil Khairiyah berdiri adalah bahagian dari kesadaran dan gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang di dorong oleh berbagai pemikiran dan gagasan yang dilangsungkan para ulama di Al Azhar oleh Rasyid Ridha, Jamaluddin Al Afgani dan Muhammad Abduh Serta semangat dan kesadaran untuk memperbaiki nasib umat dari keterbelakangannya dan dalam rangka menghadapi arus pengaruh pemikiran dan budaya Barat. Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah berdiri atas gagasan para ulama untuk mendukung sistem pendidikan dan pengajaran dan peningkatan kualitas hidup umat Islam yang menjadi prioritas kebijakan sulthan langkat pada saat itu. Sejak tahun 1870 an Kesulthanan telah aktif dan mempunyai perhatian

yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan serta pengajian agama Islam. Sulthan atas saran para ulama dan dukungan penuh permaisurinya Tengku Puan Maslurah melaksanakan pendidikan agama di Istana dan Mendirikan mesjid untuk pusat peribadatan dan pendidikan serta mendirikan madrasah mendidik generasi muda terkhusus bagi anak perempuan yang sangat tidak mendapat perhatian pada masa itu. Baginya pendidikan puteri adalah upaya utama untuk melahirkan ibu ibu yang akan melahirkan putera puteri yang shaleh yang menjadi tiang negara sehingga keamanan dan kesejahteraan meningkat.

Ketika penyelenggaraan pendidikan ini makin semarak maka dipandang perlu dikelola secara propessional dan apa lagi ada niat Sulthan untuk mewakafkan tanah dan bangunan secara utuh para ulama mengajukan gagasan untuk mendirikan organisasi Pendidikan yang diberi nama Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah sebagai badan yang resmi mengelola pendidikan dan memegang amanah wakaf sulthan. Gagasan ini diterima dan disambut baik oleh Sulthan dan segera menerbitkan keputusan kesulthanan untuk dasar keberadaanya. Untuk itu sulthan mewakafkan tanah seluas 4,2 ha yang diatas berdiri Madrasah Maslurah gedung bertingkat untuk madrasah Mahmudiyah dan Madrasah Aziziah untuk keperluan sistem pendanaan yang permanen dan tidak terikat pada keuangan kesulthan Sulthan mewakafkan pula sebidang kebun seluas \pm 40 ha ? dan beberapa pintu toko di kota Tanjung Pura dan Binjai. Dalam data sejarah pendidikan Islam di Indonesia setelah Bayangkari Islah yang dibentuk Sulthan Agung Mataram Islam untuk mengelola

pesanteren dan pendidikan serta mesjid maka baru kemudian setelah itu adalah Jam iyah Mahmudiah Li Thalabil Khairiyah di Langkat. Sesungguhnya gagasan ini sangat modern pada masa nya.

b. Jamiyah Mahmudiyah Li Tahalabil Khairiyah Organisasi Pendidikan Sosial kemasyarakatan dan semangat kebangsaan

Organisasi ini mengambil nama Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah yang bila kita cermati kalimat perkalamat atau kata perkata sesungguhnya bermakna Jam'iyah bermakna Gerakan atau serikat atau organisasi, Mahmudiyah berarti Terpuji, Li Thalabi untuk mencapai, Khairiyah yang berarti Kebajikan. Jadi Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil khairiyah berarti gerakan atau organisasi mulia atau terpuji untuk meraih kebajikan. Penabalan nama ini bukan hanya asal nama tetapi ini merupakan wujud dari perkembangan pemikiran dan pemahaman ulama serta suasana kesadaran anak bangsa masa itu. Dikalangan Kuli Kontrak di Langkat pada masa itu telah berkembang secara diam diam gerakan Budi Utomo yang mengupayakan perbaikan nasib wong cilik. Para ulama memandang gerakan Budi Utomo itu baik tetapi bersifat eksklusif dan tidak berbasis agama. Justru itu perlu organisasi yang lebih inklusif dan berbasis agama dan bernuansa universal tidak terikat etnis. Justru itu nama Jamiyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah dipandang lebih tepat untuk mewadahi cita cita yang mulia dan sepenuhnya untuk kebajikan kemanusiaan dan peningkatan peradaban. Para ulama dan juga sulthan pada masa itu menyadari

sepenuhnya Islam harus menjadi pelopor pengentasan peradaban dan menjadi perekat kehidupan berbangsa ke depan. Para ulama dengan Sulthannya yang arif telah berhasil memaknai seruan Allah SWT untuk segera meraih keampunan dan ridha Allah berupa surga Jannatun naim yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan Allah untuk kaum yang bertaqwa. Para ulama mengetahui Allah menyeru dalam al Qur'an untuk bersegera itu dengan kata kata Wasyari'u dan pada ayat yang lain fastabiqul khairat yang artinya sama berlomba atau bersegera. Mereka telah dengan cerdas memaknainya dengan menciptakan suatu sistem agar semua orang dapat bersegera meraih keampunan dan mendapatkan kebajikan yaitu mewujudkan suatu wadah perjuangan itulah " Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil Khairiyah. Justru itu Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil khairiyah sepenuhnya disetujui Sulthan bergerak untuk pendidikan pengajaran agama dan peningkatan akhlak serta tumbuhnya suasana regilius dikalangan masyarakat untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang mana kegiatan itu telah diselenggarakan sejak tahun 1887.

Suasana Indonesia saat itu (awal abad ke sembilan belas) memang sedang dalam era kebangkitan pada saat yang sama di Jogjakarta telah pula berdiri pada bulan Oktober 1912 organisasi pendidikan dan gerakan sosial keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Jamiyah Mahmudiyah sama usianya dengan Muhammadiyah hanya selisih satu bulan saja Jam'iah Mahmudiyah li Thalabil Khairiyah berdiri pada bulan Desember 1912. Pergolakan dan perkembangan pemikiran ke Islaman, kemanusiaan dan kesejahteraan serta kebangsaan telah

tumbuh dikalangan ulama dan aktivis serta kalangan Istana. Beberapa tokoh muda yang dibesarkan dalam kancah pendidikan dan nuansa pemikiran di Jamiyah Mahmudiyah telah tumbuh menjadi landasan sikap dan pendirian yang kuat pada diri mereka seorang diantaranya adalah Tengku Amir Hamzah yang berkesempatan melanjutkan pendidikan di Jawa dan bertemu dengan para aktivis muda kebangsaan. Sikap dan pendirian serta pemikiran yang telah membesarkannya di bumi melayu telah menginspirasinya untuk bangsa ini pada pertemuan akbar tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda telah bersepakat untuk bersatu dan menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kupiah sebagai topi kebangsaan. Beliau sendiri kemudian menjadi seorang tokoh pujangga baru dan atas perjuangan pemikiran serta ketokohnya ia telah terpilih sebagai seorang pahlawan nasional. Semangat kebangsaan yang telah terpupuk sejak dirahim Jamiyah Mahmudiyah dibawah kearifan dan kebijakan kesulthanan dan keilmuan para ulama Langkat telah memberi kontribusi besar pada berdirinya bangsa ini.

Adanya dinamika pemahaman Islam dan pemikiran kebangsaan di Jamiyah Mahmudiyah tidaklah mengherankan hal ini didukung beberapa faktor diantaranya adalah jaringan sulthan Musa dan pelanjutnya Sulthan Abdul Aziz bin Abdul Jalil yang luas sehingga diduga beliau sejak tahun 1887 an juga telah bersentuhan dengan berbagai gagasan pembaharuan Islam di Timur Tengah, Para ulama yang mendampinginya dan diundang dari berbagai daerah seperti dari Minangkabau dari Riau kerajaan Siak, yang juga berpandangan maju dan telah mendapat pencerahan

dengan bacaan kitab tafsir Jalalin dan tafsir Al-Manar, serta majalah Urwatul Wusqa dan pengalaman belajar di Timur Tengah serta mengajar di kawasan Nusantara seperti di semenanjung Malaysia dan pergaulan dengan tokoh ulama besar di Timur Tengah. Serta kehadiran beberapa ulama guru besar dari Al Azhar yang diminta Sulthan mengajar di Madrasah.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika menyatakan bahwa Jam'iyah Mahmudiyah sebagai organisasi pendidikan dan sosial adalah kekayaan sejarah bangsa dan juga kekayaan sekaligus kebanggaan daerah. Dari Madrasah Jam'iyah Mahmudiyah Li thalabil Khairiyah telah lahir tokoh tokoh ulama dan ilmuan serta cendikiawan diantaranya menjadi tokoh nasional tercatat diantaranya Adam Malik dan tokoh lain pada generasi belakngannya.

Kehadiran Jam'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah yang memberi semangat dan dorongan gerakan keislaman dan kebangsaan ini juga telah mendorong tumbuhnya berbagai organisasi keIslaman lainnya di Sumatera Utara seperti Al Jami'atul Washliyah tahun 1930 dan Al Ittihadiyah tahun 1932 yang pendirinya adalah Ahmad Dahlan seorang ulama alumni Jam iyah Mahmudiyah li Thalabil Khairiyah. Sebelumnya tahun 1926 berdiri Nahdhatul Ulama di pulau Jawa.

Karena itu sebagai generasi penerus kita haruslah dapat memahami gagasan utama serta tujuan para ulama dan sulthan mendirikan Jamiyah Mahmudiyah li Thalabil khairiyah dan dapat menjaga keberlangsungannya serta mengembangkannya secara cerdas dan kreatif.

Hal ini penting karena sesungguhnya kita tidak hanya menerima amanah menjaga wakaf dan member dayakan madrasah saja tetapi semangat, ide sentral dan tujuan Jam'iyah Mahmudiyah li Thalabil khairiyah juga harus kita pelihara dan kembang berdayakan dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

c. Kifrah Jamiyah Mahmudiyah

Saat ini Jam'iyah Mahmudiyah Li thalabi Khairiyah telah memasuki melinium kedua tepatnya memasuki usia 104 tahun. Setelah pada usia ke 100 kita rayakan besar-besaran maka apakah tahun ini kita adakan acara peringatan atau tahun depan pada usia 105 tahun terserah musyarakah kita nanti. Usia 104 tahun sama dengan Muhammadiyah tetapi bila kita cermati nasibnya tidak sama Muhammadiyah saat ini telah berkembang keseluruh pelosok Nusantara dan mengklaim pengikutnya ada 40 juta Sedangkan Jamiah Mahmudiah Li Thalabil Khairiyah tidak mengembangkan sayapnya, se sumatera utara se sumatera apatah lagi se Indonesia untuk Langkat saja kifrahnya kurang ada atau tidak terdengar Saat ini Muhammadiyah memilki 350 Universitas dan ribuan sekolah dan madrasah Sedangkan Jamiah Mahmudiah Li Thalabil Kahiriyah memiliki satu perguruan tinggi dan beberapa madrasah semestinya perguruan tingginya harus mampu diurus dengan baik sehingga menjadi Sekolah Tinggi panutan dan demikian juga madrasahnya harus dapat menjadi madrasah unggulan.

Tentu tidak boleh cemburu dengan Muhammadiyah mereka tumbuh berkembang dan meluas karena mereka memahami serta menghayati secara sungguh sungguh

gagasan utama dan tujuan organisasi itu didirikan. Mereka menumbuhkan budaya jangan hidup dari Muhammadiyah tetapi hiduplah Muhammadiyah, Mereka menumbuhkan budaya fastabiqul khairat dan saling mendukung, menghargai satu sama lain, menghormati jasa para pendahulu, mematuhi semua asas keorganisasian.

Mencernati itu semangat inilah yang harus di tumbuhkan jika JML termasuk madrasah maupun Sekolah Tingginya mau maju berkembang kedepan budaya organisasi yang taat asas. Berupa tertib organisasi, tertib administrasi manajemen, tertib keuangan, tertib tata laksana harus menjadi prinsip kita semua. Kita harus menghargai semua yang berjasa dan berdedikasi untuk pengembangan organisasi pendidikan keagamaan ini. Semua fungsionaris tidak boleh saling mengecilkan saling menyalahkan, saling tidak acuh.

Jamiyah Mahmudiyah memang memiliki kesejarahan yang hebat kita punya pahlawan nasional bahkan lebih dulu mempunyai tokoh wanita Tengku Puan Maslurah, dari Jam'iyah tampil dipanggung sejarah Indonesia alumninya Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden dan sekjen PBB. Lebih dulu memiliki gedung yang indah sebelum ada madrasah atau sekolah agama memilikinya, telah lebih dahulu menjadi kota pelajar dari Yogyakarta. Menjadi tempat berseminya pemikiran untuk menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa nasional yang disuarakan Tengku Amir Hamzah dan mendapat sambutan dari berbagai perkumpulan pemuda nusantara. Kupiah langkat sebagai topi nasional. Itu adalah kekayaan sejarah kita

namun kita tidak boleh terperosok pada romatisisme sejarah dalam arti kata hanya membanggakan masa lalu tetapi kita harus jadikan sebagai modal utama perjuangan kita kedepan. Sekolah tinggi kita harus kita kembangkan pada perhelatan 100 tahun Jam'iyah kita telah dengungkan STAJM untuk menjadi Institut dan menuju menjadi Universitas. Ini perjuangan kita kedepan Kita harus mengepakkan sayap Jam'iyah untuk tidak hanya mempunyai hanya satu yayasan perguruan tinggi dan madrasah jamiyah Mahmudiyah li Thalabil khairiyah harus berkembang menjadi madrasah yang unggul, model yang teruji untuk dijadikan acuan yang lain. Alumni yang sudah cukup banyak haruslah menunjukkan kualitasnya dan kiprahnya bagi pembangunan daerah.

Tetapi sekali lagi itu semua hanya akan menjadi angan angan kosong bila tidak mengembangkan budaya organisasi yang sehat, cara kerja yang professional dan saling membesarkan saling menghormati. Sejalan dengan itu upaya dengan dukungan budaya organisasi yang baik akan lebih kuat bila mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Kami mohon pihak pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan dan perhatiannya demikian juga Majelis Ulama dan tokoh masyarakat sehingga Jam'iyah dengan semua elemen pendidikan yang diasuhnya dapat lebih maju kedepan. Jam'iah mahmudiah harus menjadi icon Langkat dan sekaligus Icon Melayu dan Icon Indonesia. Setiap eksponen JML harus bersegera dan mulai merubah paradigma dan perilaku budaya organisasi. Tidak ada waktu lagi bersegera

Ulasan singkat ini mudah mudahan bermanfaat , terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan bantuan dan perhatiannya kepada pengembangan dan peningkatan kualitas Jam iyah Mahmudiyah sangat perlu dilakukan denganmeningkatkan kualitas Jamiah Mahmudiayah dan kifrahnya

Sebagai penutup rangkuman pantun ini perlu dicamkan semua eksponen orgnasiasi sosial pendidikan Jamiah Mahmudiyah Li Thalabil khairiyah :

Kota bertuah si Tanjung Pura

Tempat berkumpul para Ulama

Jam iyah Mahmudiyah warisan lama

Yang menjadi amanah bagi kita semua

Indra Bungsu Gagah Perkasa

Diangkat menjadi Panglima Raja

Jamiah Mahmudiah amanah bagi kita semua

Yang harus dikembangkan dan dibina sepanjang masa

Pesan Datuk Nini tentang Petuah

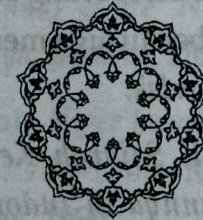
Jagalah Negeri dari Perompak

Membina Jamiah adalah amanah

Satukan langkah kitapun harus kompak.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Assalamu laikum warah matullahi wabarakatuh



DAFTAR PUSTAKA

- Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah*, (Kairo, Dar al-Qaumiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1964).
- A.Malik Fajar, *Membangun Madrasah Sebagai Wahana Peradaban Modern*, dalam Dawam Raharjo, (ed) *Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Intermasa, 1977)
- B.Rangkuty & A.Husin Umar, *Sejarah Islam II; Zaman Khalifah Usman Bin Affan*, (Jakarta: Tintamas, 1953)
- Depatemen Agama , *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Depag, 1993,
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982)
- Fachruddin, *Keberdayaan Pendidikan Islam*, (Medan, IAIN Press, 2004)
- Jamaiyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah, *Pembaharuan Pendidikan di Sumatera Timur*, (Medan ; IAIN Press, 2013)

- Harry J. Benda, "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Islam di Indonesia", dalam Taufiq Abdullah (ed) *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tinta Emas, 1974)
- Izhar Al-Haq *fi Silsilat Raja Perlak*, ditulis oleh Abu Ishaq al-Makarani al-Pasi seorang sejarawan dari Mekran-Baluchistan) beliau juga menulis naskah *Idarul Haq fi Mamlakat Perlak*;
- KH. Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978). h. 247
- Kifrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesanteren*, Jakarta: Cemara Indah, 1976
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara, 1979)
- Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Cv Amico, 1996)
- NA. Baloch, *Advent of Islam in Indonesia*, (Pakistan, Lahore, 1967)
- Syed Husain Nashar dan Ali Ashraf, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam* (Bandung; Gema Risalah Press, 1993)
- Stenbrink, *Pesanteren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, (Jakarta: Bhratara, tt), h. 14
- V.I Barginsky, *Tasawuf dan Sastra Melayu*, (Jakarta: RUL, 1993)
- Yusuf Abdullah Puar, *Masuknya Islam ke Indonesia*, (Jakarta: PPB Diknenum Depdikbud, 1985)
- Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Islam, Depag RI, 1982)

- Ahmad Syalabi, *Tarikh at-Tarbiyah*, Dar al Kutub, Cairo, 1952
- Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, Abad XVII dan XVIII*, Bandung, Mizan, 1995
- Departemen Agama RI, *Undang Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf & PP NO 42 thn 2006 Tentang Pelaksnaannya*, Jakarta Dirjen Bimas Islam 2007
- Charles Michael Stanton, *Higer Learning In Islam, The Clasical Priode A.D. 700-1300*, Rowman & Little Field Publisher Inc. 1990
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity : Trans formation an Intelctual Tradition*, Chicago The University of Chicago, 1987.
- George Makdisi, *The Rise Of Colegges, Institution Of Learning in Islam in The West*, Edinburgh University Press, 1981
- Goerge Makdisi "On The Origin and Development of the College in Islam and the West" Edinburgh University Press, 1984
- Habib, *Sejarah Pendidikan Islam Masa Abbasiyah*, Yogyakarta, Pustaka Al Itqan, 1954
- Harun Nasution, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Jakarta, UI Press, 1986
- Ibnu Hisyam, *Al- Sirah Al-Nabawiyah*, Juz I & II, Mesir, Syirkah Maktabah wa Math baah wa Mustafa al Bab al Halabi Al Auladuh, 1955
- Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah* NY.: Ballingen Foundation, 1958.
- Khalil E. Semaan (ed.3), *Islam in Medival West*, (Albany: Suny Press, 1980)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1992.

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979).

Monzer Kahf, "Waqaf", in J.L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol. IV, New York: Oxford University Press, 1995.

Roger Graudy, *Mencari Agama pada Abad XX, Wasiat Filsafat Roger Graudy*, Edisi Indonesia, Terj. Prof. H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Sayyed Amer Ali, *A short History of The Saracens*, New Delhi: Kitab Bahaavan, 1976.

Saad Mursi Ahmad, *Tarikh Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Mesir: Alam al Kutub, 1974), p. 118.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz ii, Beirut: Dar al -Kitab, al-Arabi, 1974

UII, *Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga UII pasal 1 dan 8*. UII Pres, 1988



*Jam'iyah Mahmudiyah
Li Thalabil Khairiyah*

KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI NUSANTARA

Kajian ini mencoba menelusuri berbagai kebijakan yang dilakukan sulthan Langkat dan para ulama pada masanya dalam bentuk pembaharuan pendidikan yang pernah digagas dan dikembangkan di Sumatera Timur yang meliputi upaya pembaharuan dalam hal: Pengembangan dan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Islam, Memperluas fungsi Pendidikan Istana; Pendidikan Untuk Bangsawan dan rakyat, Memberikan hak otonomi wilayah pusat belajar dan pusat kehidupan masyarakat yang shaleh, Mengembangkan Model Pendidikan Madrasah, Mengembangkan sistem jejang pendidikan dan Struktur Kurikulum, Sistem Ujian, Memberikan bea siswa belajar ke Azhar Kairo, Ummul Qura Mekah, dan Prancis, Kerjasama ketenagaan, Dana Wakaf, dan Asrama

Kesemua kebijakan Pembaharuan pendidikan di Sumatera Timur ini jika di dibandingkan dengan daerah lain maka dapat dinyatakan sebagai kebijakan pembaharuan pendidikan yang pertama di Nusantara



ISBN 978-602-6918-48-2



9 786026 918482